

BUKA

EDISI XIII-DESEMBER 2021



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



MAJALAH KOMISI
INFORMASI PUSAT

MERAWAT HARAPAN

**Transformasi
Sektor
Kesehatan
Nasional**

**Makin Terbuka,
Makin Percaya**

**Memikirkan
Ulang
Pengelolaan
Negara**

**Launching IKIP
di Yogyakarta
2021**

DAFTAR ISI

Dari Redaksi

Wajah dan Harapan Baru 3

Opini

Presidensi G20; Ujian Kepemimpinan Global 4

Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Desa melalui Apresiasi Desa 5

Signifikasi SLIP Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa 7

Cover Story

Cahaya Besar di Lorong Temaram 10

Laporan Utama

Transformasi Sektor Kesehatan Nasional 16

Memikirkan Ulang Pengelolaan Negara 20

Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting 24

Equilibrium Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat 28

Para Penabur Harapan 32

Industri Farmasi : Saatnya Mandiri 38

Hidup Harmonis Dengan Wabah 42

Menuju Endemik 46

Luhut dan Kepemimpinan Efektif di Masa Krisis 50

Peristiwa

Makin Terbuka, Makin Percaya 53

Launching KIP: Menghitung Dampak Keterbukaan Publik 56

Komisioner

Menangani ODGJ Secara Integratif 61

Hak Untuk Tahu 63

Meningkatkan Kapasitas Panitera dan Panitera Pengganti 64

Sinergi KIP dan KOMPOLNAS 65

Regional

BNI 46 Smart City: Bantu Pemda Tingkatan Pendapatan 66

BUKA

Majalah Komisi Informasi Pusat (KIP)

Pemimpin Umum

Gede Narayana

Pemimpin Redaksi

Romanus Ndaulendong

Board

1. Gede Narayana (Ketua KIP)
2. Hendra J Kede (Wakil Ketua KIP)
3. Romanus Ndaulendong (Komisioner KIP)
4. Cecep Suryadi (Komisioner KIP)
5. Wafa Patria Umma (Komisioner KIP)
6. M. Syahyan (Komisioner KIP)
7. Arif Adi K (Komisioner KIP)

Sekretaris Redaksi

Munzaer

Nunik Purwanti

Sukarni Lestari

Bernard Yuari Putranto

Redaktur

Annie Londa

Tya Tirtasari

Fathul Ulum

Reporter

Siti Azizah

Lenny Sulistianti

Melda Simamora

Karel Salim

Fotografer

Abdul Rahman

Ari Wijaya

Media Development & Strategy

Albert & Co

Graphic Designer

Ken Isaiah

Penerbit

Komisi Informasi Pusat (KIP)

Republik Indonesia

Wisma BSG Lt. 9, Jl. Abdul Muis No. 40,
Jakarta Pusat

DARI REDAKSI

Wajah dan Harapan Baru



Majalah ini, telah berusia 7 tahun. Bisa dianggap masih muda, namun boleh juga menyebutnya sebagai sedang tumbuh menuju dewasa. Hanya soal angka saja dan setiap orang bisa menjadikan ulang tahun sebagai tonggak awal untuk perubahan dan kelahiran baru.

Buat kami, usia 7 tahun ini dijadikan sebagai proses kelahiran baru (*newborn*). Kami hadir dengan wajah, isi, design dan semangat baru. Kami ingin menjadikan majalah ini benar-benar mendukung visi para pimpinan dan staff di Komisi Informasi Pusat (KIP), untuk terus bekerja dengan baik, memperbaharui diri serta bekerja berdasarkan kaidah intelektual serta mendorong keterbukaan informasi badan publik.

Kami ingin jadikan majalah ini sebagai satu dari sekian upaya untuk memperlihatkan wajah intelektualitas dari lembaga negara ini kepada publik. Selain majalah, kami juga menerbitkan sebuah jurnal ilmiah, berisi tulisan, riset dan gagasan konstruktif di bidang komunikasi publik demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab.

Kebetulan juga, laporan utama kali ini mengangkat topik “Harapan Baru” yang harus kita tetap paterikan dalam benak kita masing-masing setelah hampir dua tahun kita didera wabah Covid-19. Apapun varian baru, seperti Omicron yang kini sudah menyerang beberapa negara, dan bakal menjadi batu sandungan baru pemulihan ekonomi dunia, setidaknya kita sudah siap mulai dari pencegahan,

perawatan/pengobatan hingga proses pemulihan. Kini kita bisa menyanyikan credo bersama; percaya harus bisa bangkit dengan cara hidup, cara kerja, cara berkomunikasi, serta cara bermasyarakat yang lebih baru.

Tahun ini kita punya event besar yang bakal menjadi warisan dan peninggalan (*legacy*) dari kepemimpinan KIP 2017-2021; Memperkenalkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan pendekatan yang lebih ilmiah, yakni *survey*, *focus group discussion* (FGD) serta review dari ilmuwan di bidang komunikasi. Metode ini kami gunakan sebagai upaya memperkuat monitoring dan evaluasi (*monev*). IKIP diharapkan bisa mengukur indeks keterbukaan informasi publik lebih obyektif dan transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Anugerah Keterbukaan Informasi badan publik (BP) tahun ini ditandai dengan makin banyaknya peserta yang dinilai. Secara kumulatif banyak pencapaian dan perbaikan dari anugerah tahun sebelumnya. Selain jumlah partisipan yang makin bertambah dan beragam, hasil yang diperoleh juga menunjukkan perbaikan yang nyata dari sisi kualitas keterbukaan badan publik terhadap hak tahu masyarakat atas informasi publik yang berkaitan langsung atau tidak dengan kehidupan mereka setiap hari.

Akhirulkalam, kami ucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, semoga harapan-harapan baik kita tahun ini bisa terwujud di tahun 2022.

Presidensi G-20; Ujian Ketangguhan Kepemimpinan Presiden Jokowi



Romanus Ndaul Lendong

Pemimpin Redaksi
Majalah BUKA

Mari kita jadikan tahun 2022, jadi tonggak yang punya makna historis yang penting bagi perjalanan bangsa ini. Setelah lebih 2 tahun kita didera beban yang besar; menghadapi badai Covid-19 yang menguras energy dan pikiran, kita jadikan tahun 2022 menjadi batu pijakan untuk sebuah lompatan yang lebih tinggi, pemulihan di berbagai sektor kehidupan terutama kesehatan dan ekonomi dan menjadikan Indonesia jadi bangsa yang berpengaruh di percaturan politik dan ekonomi global.

Presidensi G-20, akan jadi panggung bagi Presiden Joko Widodo memperlihatkan kualitasnya sebagai pemimpin kelas dunia yang telah berhasil membawa bangsa Indonesia jadi negara yang disegani kawan dan lawan. Ia akan memimpin agenda besar “*Recover Together, Recover Stronger*” atau Pulih Bersama. Sukses Pertemuan 20 negara ini nantinya menjadi alat ukur dan catatan penting bagi Indonesia dalam kepemimpinan global dalam mengendalikan perubahan dalam beberapa bidang penting.

Sudah banyak prestasi Jokowi diakui dunia. Indonesia yang menempatkan diri di peringkat ke 5 dunia negara terbaik dalam menangani Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 3,7% - 4,5 % tahun 2021, di antara ekonomi dunia lain yang lagi lesu adalah catatan positif tersendiri yang diapresiasi.

Dengan posisi Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo akan memimpin rencana-rencana prioritas, seperti pertama agenda kesehatan global, dengan rencana aksi menata ulang arsitektur kesehatan global dengan menjadikan Indonesia dan ASEAN menjadi

transfer *hub* untuk pengembangan dan produksi vaksin global.

Agenda kedua yakni transformasi berbasis digital dengan menjadikan ekonomi digital menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan agenda ketiga berupa transisi energi baru dengan memperluas akses terhadap teknologi menuju energi bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Kita jadikan Presidensi G20 menjadi ajang memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di mata ekonomi utama dunia. Sudah saatnya Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo harus jadi *powerful leader* untuk setidaknya mengarahkan semua agenda G-20 bisa memberikan manfaat besar bagi kepentingan domestik, tanpa mengesampingkan wajah Indonesia di mata dunia.

Sebagai lembaga negara yang bekerja berdasarkan UU NO 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami berkewajiban untuk membantu Presidensi G-20 dalam mendorong agar semua agenda-agenda ini dipahami publik. Dan yang paling penting tentu saja agar semua agenda itu didukung oleh semua elemen bangsa agar bisa dikerjakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia di masa kini maupun masa depan.

Sejumlah event besar di depan mata tersebut adalah bukti kuat untuk kita terus membangun optimisme dan harapan akan masa depan Indonesia tetap akan cerah. Kita bisa buktikan, kita bisa keluar dari tekanan yang berat selama dua tahun untuk menata kembali sejumlah kekuatan untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional, regional dan global. Ada harapan besar bangsa Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dengan sejumlah apresiasi yang diakui dunia akan menjadi kekuatan penting di dunia, menjadi pemimpin sejati yang menginspirasi (*inspiring leader*) bukan sebagai pengekor (*follower*).

Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa melalui Apresiasi Desa



Wafa Patria Umma
Komisioner



Era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Penyelenggara negara pun membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F, berisi hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Pasal tersebut membawa semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Implementasi keterbukaan informasi publik, ini sedari awal ditunjukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*.

Good governance merupakan konsep dan praktek yang sedang dilakukan pemerintah dan organisasi publik sebagai bagian dari mekanisme pemerintah serta warga yang mengatur dalam pemecahan masalah publik. *Good governance* yang mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mencakup pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata pemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik.

Pesatnya Informasi harus mampu dimanfaatkan dalam memecahkan masalah

publik dalam proses penyampaian informasi publik agar diperoleh, diakses, dan diketahui masyarakat secara tepat dan cepat sesuai kebutuhannya. Informasi yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik untuk melakukan pelayanan penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan khususnya bagi PPID dan masyarakat desa yang masih kurang akses Informasi, sehingga rentan mengalami konflik dan cepat percaya akan HOAX. Selain itu, tantangan besar lainnya yang secara nyata adalah memerangi berita bohong yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan bernegara.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Sebagaimana amanat UU KIP kepada setiap Badan Publik untuk mengharuskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Masyarakat memiliki kontribusi besar dalam hal peran serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat Desa, Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa. Sasarannya memudahkan perangkat desa dalam menyediakan akses layanan informasi publik dan memastikan hak masyarakat desa terpenuhi. Kontribusi semua stakeholder Desa dalam menjalankan mandat UU KIP dan Undang-undang Desa (UU Desa) serta prioritas nasional Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka

negara kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan penghargaan dan penghormatan serta menjadi stimulan bagi desa dan pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri, maju, sejahtera dan demokratis sebagaimana mandat UU Desa.

Salah satu indikator dalam melihat terlaksananya implementasi UU KIP dan UU Desa adalah tersedianya informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat lokal maupun pihak terkait dalam rangka tata kelola desa yang baik pula. Informasi yang terkait desa adalah hak masyarakat desa untuk mengaksesnya, baik terkait dengan administrasi desa, keuangan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa ataupun yang lainnya. Namun dalam kenyataannya tidak seluruh masyarakat desa bisa memperoleh informasi informasi tentang desa mereka dengan mudah, hal itu karena masih banyaknya penyelenggara pemerintahan desa yang kurang memberikan akses terhadap informasi terkait desa kepada masyarakat, baik melalui media informasi seperti baliho, papan nama proyek, papan informasi, media sosial, media cetak atau media lain yang seharusnya dimiliki desa.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dipraktekkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Praktik Keterbukaan Informasi yang dilakukan Desa perlu diberikan Apresiasi khusus, agar segala kewajiban Desa dapat secara maksimal di implementasikan. Karena hal tersebut Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan BAKTI Kominfo dan Kementerian Desa PDTT memberikan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang dilakukan oleh 3 Lembaga ini memiliki tujuan untuk mendorong terpenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses, selain itu mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa, mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan good governance, menghindarkan Desa dari budaya tertutup.

Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan.

Hal yang menjadi indikator penilaian adalah Komitmen, sumber daya manusia (SDM, Dokumen, Partisipasi, Akses dan Inovasi yang dilakukan oleh Desa. Dalam tahapan Apresiasi adalah Sosialisasi, rekomendasi, desk review, dan pendalaman lapangan. Dari 33 Provinsi yang memiliki desa hanya Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat yang tidak mengirimkan rekomendasi desa. 31 Provinsi yang merekomendasikan desa di wilayahnya terkumpul 42 Desa yang mewakili masing-masing provinsi, dan setelah dilakukan desk review oleh Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kominfo, Kementerian Desa PDTT maka disepakati 10 Desa dengan nilai terbaik untuk dilakukan pendalaman lapangan ditahap selanjutnya.

Sebagai hasil dari tahap akhir dan Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kominfo, Kementerian Desa PDTT memberikan Apresiasi kepada Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagai peringkat 1, Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali sebagai peringkat 2, Desa Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh sebagai peringkat 3, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai peringkat 4, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagai peringkat 5, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur sebagai peringkat 6, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Sanana, Maluku Utara sebagai peringkat 7, Desa Karangari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peringkat 8, Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sebagai peringkat 9, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sebagai peringkat 10.



Hendra J. Kede
Wakil Ketua KIP/
Koordinator
Penyusunan Perki
1/2021 tentang SLIP

Signifikansi SLIP Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa



Senin, 6 Desember 2021, penulis mendapat informasi melegakan bahkan sangat menggembirakan. Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Agus Wijayanto, S.H., M.H menyampaikan kabar sukacita bagi pemerintahan Indonesia, karena aspek-aspek keterbukaan sudah masuk lebih dalam ke operasional penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengadaan barang dan jasa. Dengan keputusan ini KIP akan semakin berperan dalam urusan transparansi publik.

Kabar gembira tersebut adalah berkenaan dengan telah selesainya proses pengundangan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), yang salah satu bab nya mengatur tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), dikenal juga dengan sebutan Pengadaan Barjas Pemerintah, oleh Kemenkumham RI, lengkap dengan Salinannya.

Kabar ini juga melegakan kami. Proses pengundangan ini selama ini dikoordinasi Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, M. Sahyan, setelah sebelumnya selesai dirumuskan oleh Tim Perumus dimana penulis sebagai Koordinator Tim Perumus. Dan sebelumnya juga telah melalui proses politik hukum yang sangat dinamis di pleno Komisi Informasi Pusat.

Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 dan Tambahan Berita Negara Nomor 37, tertanggal 30 Juni 2021.

Perki SLIP ini berhasil diundangkan setelah pergolakan pemikiran dan perjuangan sangat panjang dan melelahkan banyak pihak. Perki SLIP ini merupakan penyempurnaan dari Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP juga dan Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi. Seyogyanya penyempurnaan ini selesai tahun 2013 sesuai amanah Perki 1/2010 tentang SLIP. Namun karena satu dan lain hal baru bisa diselesaikan pada periode

Komisi Informasi Pusat 2017-2021.

Sebagai Koordinator perumusan Perki 1/2021 tentang SLIP ini pada awal perumusan menegaskan bahwa perumusan SLIP harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan penyusunan Naskah Akademis (NA) dengan melibatkan para pihak terkait sebelum penyusunan norma Standar Layanan Informasi Publik dan norma Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal ini diperlukan agar semua isu yang berkembang dan dianggap perlu dan penting selama proses penyusunan dapat terekam dengan baik. Hal ini mengingat sudah berkembangnya dinamika keterbukaan informasi publik setelah sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun umur UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan institusi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Baik terekam dalam bentuk DIM maupun dalam bentuk NA, terlepas nantinya isu tersebut disetujui atau tidak disetujui dimasukkan ke dalam norma Peraturan Komisi Informasi tentang SLIP, baik dalam tahapan politik hukum di pleno KI Pusat maupun saat harmonisasi dengan Kemenkumham.

Sehingga dengan demikian, setidaknya, jika suatu saat akan dilakukan penyempurnaan kembali sudah punya basis bahan analisisnya untuk dipelajari yang terdapat dalam DIM dan NA tersebut.

Disamping itu, DIM dan NA ini juga untuk memberikan referensi kepada publik tentang isu apa saja yang berhasil direkam selama proses penyusunan Perki ini, isu apa saja yang disetujui dan isu apa saja yang tidak disetujui, lengkap dengan basis analisis akademiknya.

Secara internal keterlibatan team sangat intens. Antara lain komisioner Moh Sahyan Wafa Patria Utama selaku Komisioner serta tenaga ahli dan staf sekretariat yang bekerja di balik layar. Juga tentunya bantuan konsultan ahli Nased, S.H. M.H yang sudah bekerja luar biasa sampai DIM, NA, dan Naskah Raperki tentang SLIP dibawa ke pleno KI Pusat. Tidak juga kalah peran tima lain seperti : FOINI, PPID Badan Publik, KI Provinsi/Kabupaten/Kota, pejabat dan staf harmonisasi serta pengundangan Kemenkumham, yang bekerja sesuai perannya masing-masing.

Dalam proses penyusunan Perki ini semaksimal mungkin mendengarkan dan mempertimbangan masukan dan pikiran seluruh kelompok, baik Badan Publik Negara, Badan Publik Bukan Negara, Wartawan, LSM, akademisi dan lain sebagainya. Mulai dari tahap penyusunan DIM, NA, maupun saat penyusunan norma.

Selama penyusunan Perki ini juga terjadi



perkembangan yang memerlukan konsentrasi dan penyesuaian khusus, diantaranya situasi Pandemi COVID-19 serta adanya prosedur harmonisasi di Kemenkumham sebelum bisa diundangkan, dimana sebelumnya prosedur harmonisasi ini tidak ada.

Sementara secara internal juga terdapat sudut pandang yang sangat kritis dan tajam terkait isu-isu yang muncul selama penyusunan di Tim Perumus dan selama proses politik hukum di Pleno Komisi Informasi Pusat.

Sebagai contoh, terkait isu pemberian legal standing kepada wartawan dan advokat sebagai Pemohon Informasi dan Pemohon Sengketa Informasi yang sebelumnya telah masuk dalam DIM dan NA.

Walaupun penulis sampai sekarang masih berpandangan isu ini dapat masuk menjadi norma positif dalam Perki SLIP yang baru dengan segala argumentasinya, namun belum dapat dimasukkan karena terjadi perbedaan sudut pandang yang sangat kuat dalam pleno Komisi Informasi Pusat. Keputusan diambil setelah melalui mekanisme voting dengan hasil yang sangat meyakinkan untuk menunda pemberian legal standing kepada wartawan dan advokat sebagai Pemohon Informasi dan Pemohon Sengketa Informasi.

Setelah Pasal 28F UUD NRI 1945, UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi (KIP) Publik, dan PP Nomor 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 1/2008 tentang KIP, maka Perki SLIP adalah peraturan utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia, menjadi acuan utama, diantaranya dalam perumusan Perki-Perki yang lainnya. Termasuk menjadi rujukan utama dan tidak terbatas pada usaha untuk mewujudkan outcome keterbukaan informasi publik yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan visi besar Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor 5 besar di dunia tahun 2045. Negara dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya 5 besar terbaik di dunia 24 (dua puluh empat tahun) kedepan. Negara dengan perlindungan masyarakat 5 besar terbaik di dunia saat Indonesia merayakan 100 (seratus) tahun kemerdekaan NKRI.

Hal mana juga sudah ditetapkan dengan sangat jelas ditegaskan dalam alinea pertama Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja (Cipnaker): “Untuk mewujudkan Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia tahun 2045....”

Petimbangan lainnya dalam penyusunan Perki SLIP ini juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat dan maju serta regulasi yang sudah keluar terkait penggunaan teknologi informasi terbaru dalam pengelolaan informasi negara.

Hal yang paling baru dan merupakan terobosan hukum luar biasa, Perki SLIP ini juga mengatur secara khusus dalam BAB tersendiri dan merupakan norma yang bersifat lex spesialis tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJP).

Perki SLIP ini, dengan demikian, diharapkan dipahami dengan baik oleh para Pimpinan Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Publik; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, unit kerja perencanaan, unit kerja yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan tentu saja Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana.

Disamping itu Perki SLIP yang juga berisi norma Keterbukaan Informasi BPJP ini juga diharapkan dipahami dengan baik oleh penegak hukum : Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat.

Terakhir, Perki SLIP ini diharapkan juga dipahami dengan baik oleh para penyedia Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan, pihak kampus, dan masyarakat umum.

Secara garis besar, beberapa muatan dalam Perki 1/2021 tentang SLIP yang baru diundangkan ini dapat penulis sampaikan sebagai berikut : Pertama, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi dinyatakan tidak berlaku terhitung semenjak

“Hal yang paling baru dan merupakan terobosan hukum luar biasa yang dipersembahkan KI Pusat untuk memberantas praktek korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJP) adalah dimasukkannya norma yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 ini. Sehingga kedepan, Pengadaan Barjas Pemerintah harus dan wajib tunduk pada prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik”

Hendra J. Kede

Wakil Ketua KIP/ Koordinator Penyusunan Perki 1/2021 tentang SLIP

diundangkannya Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP ini, yaitu 30 Juni 2021;

Kedua, Penyempurnaan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Ketiga. Penegasan Hak dan Kewajiban Badan Publik; Keempat. Pergeseran paradigma indikator penentuan definisi Badan Publik, khususnya dan tidak terbatas terkait dengan BUMN, BUMD, serta anak perusahaannya; Kelima. Klasifikasi informasi, khususnya klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;

Keenam. Norma khusus yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJP), mulai dari tahap perencanaan sampai tahap serah terima akhir (final hand over); Ketujuh. Standard Operational Procedure (SOP) atau Standar Layanan Informasi Publik terkait data pribadi dan pelayanan untuk kelompok berkebutuhan khusus;

Kedelapan. Alur mekanisme proses Uji Konsekuensi sampai penetapan Informasi Yang Dikecualikan; Kesembilan. Bantuan Kedinasan, tukar menukar informasi lintas institusi negara; Kesepuluh. Sinkronisasi dengan prinsip Satu Data; Kesebelas. Laporan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi di setiap Badan Publik.

Cahaya Besar di Lorong Temaram

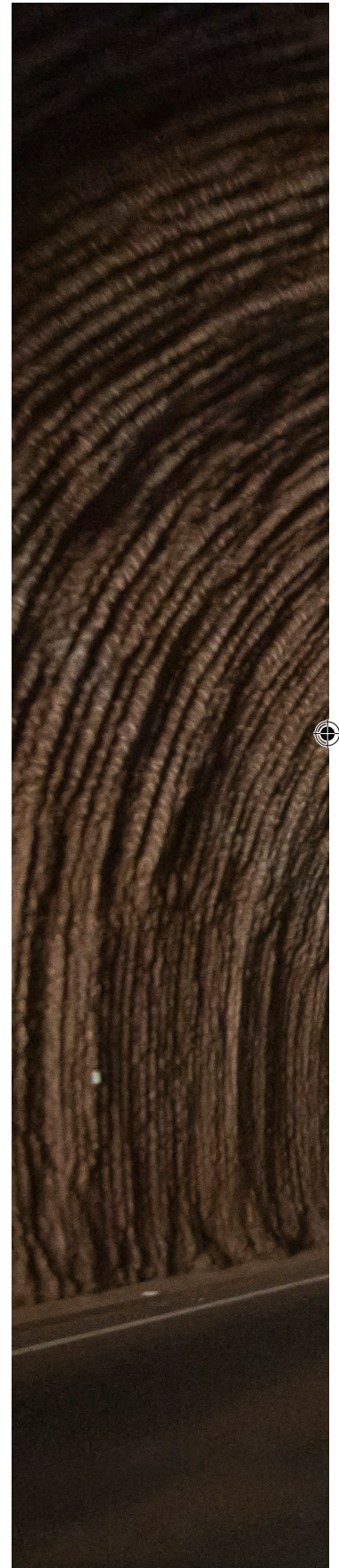
Membangun harapan mestinya menjadi gagasan besar yang terus dipompakan di ruang publik saat ini. Karena dengan adanya harapan kita sebagai bangsa bisa bangkit memulai kehidupan baru setelah hampir 2 tahun bangsa dan peradaban dunia dihantam badai Covid-19, musuh tak kelihatan, tapi pahit dan getir namun punya daya rusak yang besar.

Harus diakui wabah ini telah menguras pikiran, emosi, daya tahan serta kondisi keuangan pribadi maupun publik. Secara nasional kapasitas pertahanan kita sebagai bangsa dibikin porak poranda. Jika saja ada perang fisik terbuka, kita mungkin akan menderita kalau tidak mau dibilang kalah.

Harapan, sejatinya kekuatan tak tampak yg bisa menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memulai hidup baru atau lompatan baru ke titik yang lebih baik. Harapan itu kurva naik setelah menyentuh titik nadir.

Harapan itu hanya bisa digaungkan serta diwujutkan jika kita paham dan sadar potensi besar yang dimiliki. Entah itu rasa percaya diri, modal intelektualitas, sumber daya manusia yang handal, sumber daya ekonomi, birokrasi yang tangguh serta pemimpin yang paham ke mana arah bangsa ini bergerak dan bagaimana menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk hidup yang lebih baik atau balik dari penderitaan menuju pemulihan.

Di tengah global mega trend yang *complex*, *volatile*, *uncertain*, serta penuh *ambiguity* dan banyak elemen *surprise*, sebagai bangsa kita perlu bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergy dan memperkuat sikap waspada (*alert*) hingga memiliki sikap mental





LAPORAN UTAMA

yang mampu merespons perubahan yang terjadi diluar (*agile*). Keberhasilan dan strategi masa lalu yang sudah usang dan tidak relevan lagi dipakai saat ini perlu ditinggalkan tanpa ragu sedikitpun. Mengambil strategi baru kendati misalnya belum terbukti berhasil perlu kita ambil walau sana sini banyak error dan terbuka untuk perbaikan.

Namun ada saja potensi yang tetap aktual dan relevan terbukti menjadi modal kita sebagai bangsa keluar dari krisis. Semangat gotong royong adalah modal sosial dan budaya yang telah dan harus kita gunakan dengan baik menuju lorong hidup bangsa yang lebih cerah. Kita terbukti sukses gunakan modal ini dengan segala ekspresinya antara element masyarakat demi mengendalikan infeksi hingga titik cukup rendah.

Kita sangat tangguh dan berpengalaman menghadapi berbagai situasi serba sulit. Masyarakat kita mampu beradaptasi dengan cepat dalam kegentingan sekalipun termasuk krisis ekonomi yang menghantam beberapa kali selama 20 tahun belakangan. Hampir tidak ada yang menderita kelaparan berhari-hari. Selain negara, masyarakat kita sudah terbiasa memiliki rasa kesetiakawanan, saling berbagi dan bersedekah pada orang yang kurang beruntung. Dan semua baik baik saja.

Di tengah insiatif industri farmasi nasional dan pemerintah membuat road map industri tersebut, muncul talenta-talenta lokal yang bekerja dalam senyap dengan segala fasilitas dan keahlian yang mereka miliki, dan bisa tampil sebagai pembeda (*game changer*). Maka munculah



Dr Terawan dengan teamnya bergelut dengan inisiatif vaksin nusantara. Di belahan negeri yang lain, team vaksin merah putih yang dikendalikan pakar virologi Prof Fedik Abdul Rantam, dari Universitas Airlangga juga mengejar deadline komersialisasi vaksin merah putih yang meluncur ke pasar membangun kekebalan kawatan (*herd immunity*).

Vaksin Merah Putih mencatat kemajuan berarti. Bibit vaksin telah diserahkan ke PT Biotis salah satu anak BUMN Bio Farma untuk diproduksi tahun 2022. Keputusan ini diambil setelah BPOM telah

mengeluarkan *emergency use approval (EUA)* pada kedua lembaga tersebut untuk diproduksi secara komersial.

Ada juga vaksin produksi Baylor Medical College, Amerika yang akan diproduksi dalam negeri demi mengejar angka vaksinasi nasional. Satu lagi yang diproduksi di Indonesia adalah Zifivax. "Vaksin rekombinan protein subunit ini adalah hasil kerja sama antara Bio Farma dan Anhui Zheifei Longcom Biopharmaceutical yang sudah mendapatkan EUA dari BPOM, juga akan dikerjakan oleh PT Biotis"



“Vaksin rekombinan protein subunit ini adalah hasil kerja sama antara Bio Farma dan Anhui Zheifei Longcom Biopharmaceutical yang sudah mendapatkan EUA dari BPOM, juga akan dikerjakan oleh PT Biotis.”

Penny Lukito, Ketua BPOM

kata Penny Lukito, ketua BPOM.

Sedangkan PT Daria Varia Laboratories Group juga tak ketinggalan akan memproduksi vaksin bermerek ARCoV bekerja sama dengan Walvax Abogen, China yang berplatform mRNA, seperti halnya vaksin merek Sinovax dari China yang telah dipakai secara meluas.

Ilmuwan kita tak kalah credible. Dua orang research scientist kita Indra Rudiansyah dan Carina Citra Dewi Joe menjadi bagian penting di balik sukses penemuan dan produksi vaksin Aztra Zeneca. Tidak terhitung upaya lain seperti terapi konsavalen yang menarik turun angka infeksi serta memperbanyak angka kesembuhan pasien.

Itu baru dari sisi respons cepat darurat kesehatan. Kalau kita perluas lagi pada bidang lain, maka banyak cerita penuh harapan yang membuat kita semua optimis akan masa depan bangsa ini.

Ternyata kita mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi dalam menunjang pekerjaan. Kita terbiasa dengan WFH (*work from home*), yang dengan segala kekurangannya tetap mencatat produktivitas kerja



LAPORAN UTAMA

Dari sisi ekonomi, kita mencatat rekor pemulihan ekonomi yang mengejutkan. Di pertengahan semester kita mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 7%, di antara kabar pilu di belahan dunia lain. Angka ekspor kita mencatat tertinggi dalam sejarah mencapai \$21,42 miliar pada bulan Agustus 2021. Demikian juga cadangan devisa juga membuat rekor tersendiri mencapai \$144 miliar pada periode yang sama.



yang menggembirakan. Kendati, kita kebanyakan menjadi konsumen teknologi dunia, bangsa kita bisa beradaptasi dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari termasuk saat krisis kesehatan seperti sekarang ini.

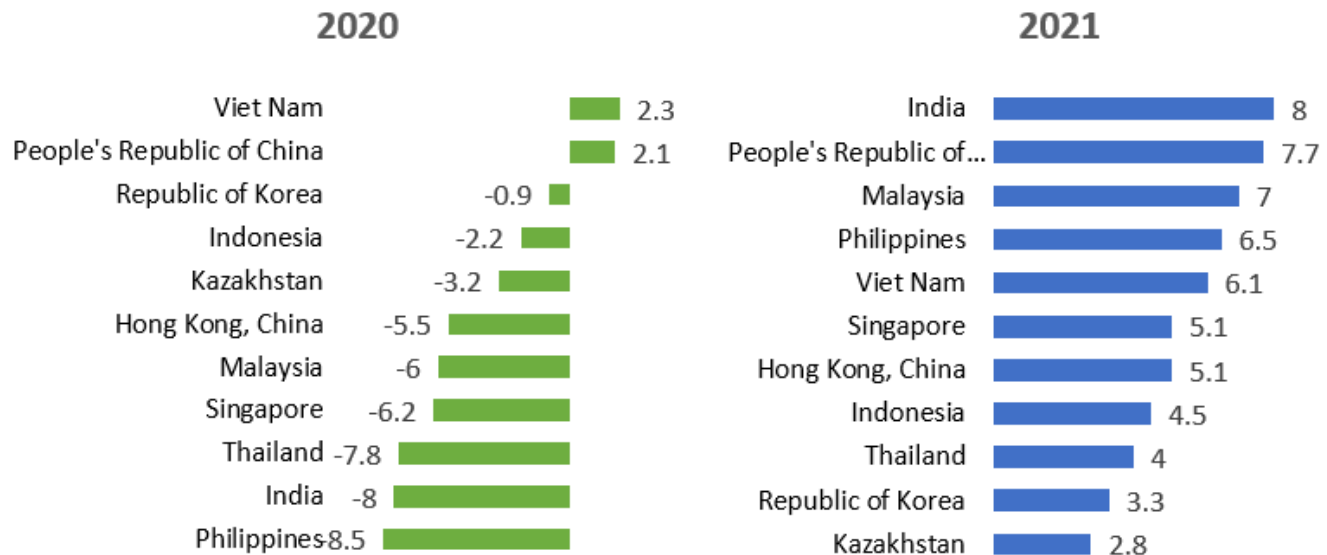
Dengan mengakui peran teknologi (*embrace technology*) dalam memobilisir sumber daya dan administrasi pemerintahan, kita sudah naik kelas dalam implementasi teknologi dalam bernegara demi merespons perubahan yang begitu cepat. Kita sudah memiliki sikap mental yang baik dan tanggap (*agile*) dalam merespons perubahan yang terjadi setiap saat. Kendati banyak yang bekerja dari rumah, tingkat produktivitas kita belum kendor-kendor amat.

Di jaman krisis seperti ini ternyata muncul beberapa pekerjaan baru yang memberikan harapan akan penciptaan lapangan kerja di masa depan. Ketika banyak toko *brick and mortar* (toko-toko fisik) kini bermunculan layanan *delivery* oleh start up lokal seperti Gojek dan Grab yang mencatatkan momen pertumbuhan yang eksponensial. Belanja sayur tidak harus lagi ke pasar becek. Sudah ada aplikasi seperti sayurbox, dan aplikasi layanan lainnya juga mendapatkan momen pertumbuhan.

Bank Indonesia mencatat transaksi digital naik 46 % tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai mencapai kurang lebih Rp800 triliun. Perkembangan *financial technology* (*fintech*) juga sangat menggembirakan untuk memberikan solusi bagi *non bankable people*. Ada sekitar 121 *fintech* yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* (pemberi pinjaman) hingga untuk layanan transaksi pembayaran (*payment services*) serta *digital wallet*.

Dari sisi ekonomi, kita mencatat rekor pemulihan ekonomi

Pertumbuhan GDP di Asia, 2020 dan 2021



Sumber: Asian Development Bank. 2020. Asian Development Outlook Supplement, December 2020. Manila.

yang mengejutkan. Di pertengahan smester kita mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 7%, di antara kabar pilu di belahan dunia lain. Angka ekspor kita mencatat tertinggi dalam sejarah mencapai \$21,42 miliar pada bulan Agustus 2021. Demikian juga cadangan devisa juga membuat rekor tersendiri mencapai \$144 miliar pada periode yang sama.

Proyek strategis nasional banyak yang selesai dibangun. Ada 17 bendungan yang bakal selesai pada tahun ini. Siap mengaliri ribuan hektar sawah, demi meningkatkan produksi pangan dan mengamankan pasokan pangan nasional. PT Krakatau Steel akan menjelma jadi pemain penting dalam sejarah industri besi dan baja nasional dan regional karena akan menjadi produsen baja moderen terbesar ke dua di dunia yang mampu menghasilkan 4 juta ton *hot rolled coil (HRC)* pada tahun 2024. PT Pertamina telah menjadi power house menggerakkan ekonomi nasional. Belum lagi kalau kita bicara perhelatan olahraga dunia seperti World Super Bike (WSBK) 2021 yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB pada bulan November 2021. Even ini akan menaikkan pamor Indonesia di pentas global.

Dari sisi politik global, Indonesia tahun 2022 akan menjalankan peran sebagai G-20 Presidency. Indonesia sebagai President akan berperan menjadi host yang baik menyelenggarakan event besar pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dari sisi pendapatan nasional. Even yang diperkirakan dilaksanakan secara serempak di Bali dan Labuan Bajo pada bulan Oktober 2022 ini akan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan

ekonomi, politik dan strategis yang penting di dunia. Kendati masih banyak persoalan bangsa yang masih terus diatasi termasuk mengatasi wabah Covid-19, namun kita terus berharap bahwa Indonesia akan menjadi penentu dinamika global (*game changer*) di masa depan.

Dari sekelumit situasi dan pencapaian di atas sudah sepantasnya kita merayakan pencapaian ini di tengah pergumulan masih panjang hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Bolehlah mulai saat ini kita mendendangkan serenade girang sambil menatap cahaya temaram di ujung lorong. Kita punya harapan besar bangsa ini akan menjadi bangsa besar.

BUDI G. SADIKIN

Transformasi Sektor Kesehatan Nasional



Budi G Sadikin (57) mendapat tugas yang cukup menantang ketika memulai pekerjaan baru sebagai Menteri. Indonesia sedang mengalami wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Tidak ada pilihan lain selain menerima pekerjaan tersebut. Dia siap menerima cacian dari masyarakat ketika tidak mampu bekerja dengan baik. Pengalaman manajerial yang luas, serta relasi di elit politik dan bisnis memudahkan dia mengerjakan tugasnya dengan cukup baik hingga hari ini mengelola system kesehatan nasional.

Mantan banker senior Budi Guna Sadikin, telah menjabat sebagai Menteri Kesehatan hampir kurang lebih 1 tahun. Dari dunia serba gemerlap, di industry keuangan dan perbankan, Budi kemudian harus mendapat tugas baru sebagai Menteri Kesehatan, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil Menteri BUMN, Erick Thohir selama setahun. Sangat tidak enak tentunya karena tugas pertamanya adalah mengatasi wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Di luar itu, harus mengurus wabah lain yang datang silih berganti seperti demam berdarah, orang dengan gangguan jiwa, malaria

hingga kesehatan pasca bencana alam dan non alam.

Belum lagi memastikan semua layanan primer seperti di puskesmas, klinik, mengurus rumah sakit rujukan, distribusi tenaga kesehatan di seluruh nusantara hingga mengantisipasi perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Masalah yang sangat kompleks ini tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu dia harus menggerakkan semua sumber daya dalam kementeriannya agar sektor kesehatan bisa makin membaik.

Tak ada pesta dan cipika dan cipiki. Dia mengemban tugas tersebut ketika situasi kesehatan nasional dan dunia sedang darurat. Sebagai seorang pemimpin dan manajer, Budi langsung tancap gas. Setumpuk masalah siap menghadangnya; angka penularan Covid-19 makin tinggi, disiplin masyarakat yang rendah, ketersediaan ruangan di rumah sakit, kekurangan alat-alat penunjang kesehatan seperti tabung oksigen, belum ada obat-obatan serta belum tersedia satupun vaksin di pasar.

Kendati bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam situasi emergensi ini, namun Budi menyadari bahwa kementerian yang dipimpinnya adalah salah satu ujung tombak penting dalam peperangan kesehatan ini.

Dia harus memastikan kementerian yang dipimpinnya selalu siaga di depan. Maka rapat marathon pun setiap hari dilaksanakan. Berbagai tindakan emergensi dilakukan demi menghadapi kebutuhan riil di lapangan seperti kelangkaan tabung oksigen, karena banyak pasien yang mengalami sesak napas. Belum lagi menghadapi perdebatan berbagai kalangan mengenai kelangkaan obat, kekurangan alat penunjang kesehatan sampai pada makin kritisnya ruang rawat rumah sakit.

Ketika puncak penularan terjadi bulan Juli sampai September 2021 Budi selalu tidur hingga larut malam. Begitu banyak yang mengirimkan pesan hingga larut malam sekedar mencari ketersediaan ruang rawat inap rumah sakit. Tidak semua permintaan itu dilayaninya. Bahkan ketika Budi baru merespon permintaan tersebut, sang pasien dikabarkan telah meninggal dunia. Saat-saat seperti ini disebutnya sebagai lowest point dalam tugasnya sebagai pejabat publik. “It is very depressing moment,” katanya kepada media pada Oktober lalu. Budi hanya ingin mengatakan dengan jabatan yang diembannya sekalipun tidak sanggup melayani semua orang atau memenuhi harapan banyak orang.

Budi tak menampik, ada kebanggaan sebagai

SETUMPUK MASALAH SIAP MENGHADANGNYA; ANGKA PENULARAN COVID-19 MAKIN TINGGI, DISIPLIN MASYARAKAT YANG RENDAH, KETERSEDIAAN RUANGAN DI RUMAH SAKIT, KEKURANGAN ALAT-ALAT PENUNJANG KESEHATAN SEPERTI TABUNG OXYGEN, BELUM ADA OBAT-OBATAN SERTA BELUM TERSEDIA SATUPUN VAKSIN DI PASAR.

pejabat negara turut serta mengatasi bencana ini dan menunjukkan hasil yang baik. Ketika angka penularan mulai menurun, sementara angka kesembuhan makin tinggi dan penyediaan sarana tempat tidur di rumah sakit sudah memadai Budi sudah bisa senyum lega. Kerja keras di kementerian serta instansi terkait sudah berbuah baik, setidaknya mengurangi cacat publik atas situasi yang terjadi.

Risiko mengemban jabatan publik sudah sangat dipahaminya. Dia sendiri barangkali bisa “tahan” terhadap gempuran, kritik, cacian serta umpatan publik kendati mereka sudah bekerja optimal. Namun dia tidak menampik, istri serta anggota keluarganya sedikit terpengaruh secara psikologis atas complain publik yang tidak pernah puas, kendati mereka sudah berhasil secara faktual.

TRANSFORMASI KESEHATAN

Budi sepakat bahwa di saat *extraordinary emergency* situation kesehatan seperti saat ini maka pemulihan kesehatan masyarakat di atas segalanya. Dia yakin jika kesehatan sudah membaik, dengan sendirinya sektor ekonomi akan bergulir dengan sendiri. Dia sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang meyakini bahwa prioritas utama saat ini adalah memulihkan kesehatan dengan cara *at all cost*.

LAPORAN UTAMA

Kendati sangat berambisi bisa melakukan vaksin sebanyak 2 juta per hari pada awalnya, Kini Budi harus realistis bahwa target tersebut cukup sulit dicapai. Apalagi perang perebutan vaksin internasional sedang terjadi. Negara-negara maju lebih memprioritaskan negaranya sendiri sebelum diekspor negara lain.

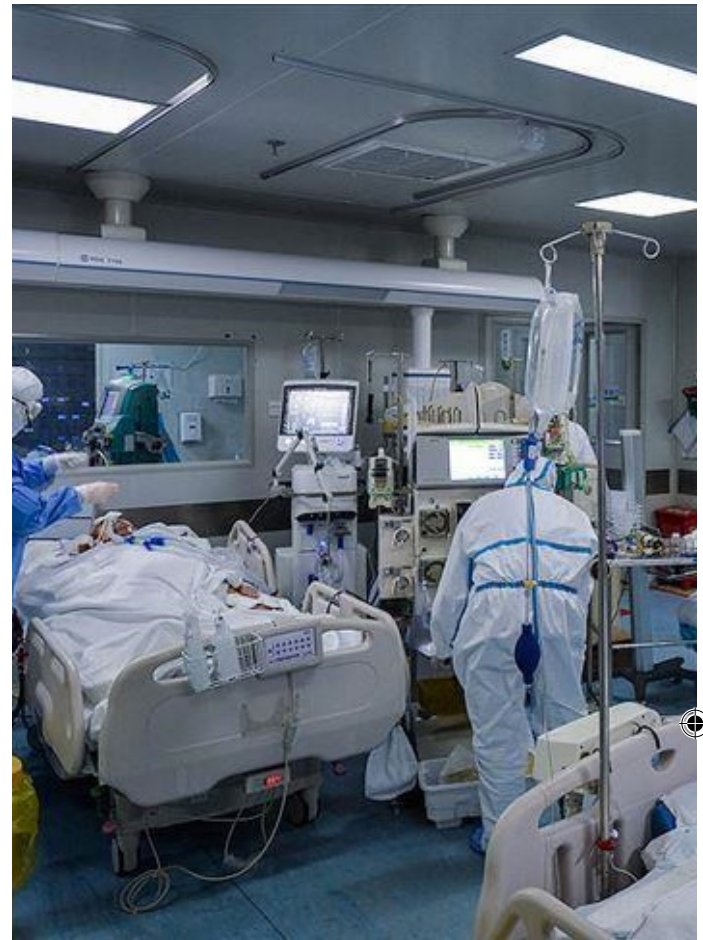
Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong dan memfasilitasi proses persetujuan produksi masal vaksin buatan lokal seperti Vaksin Merah Putih maupun vaksin lain yang akan diproduksi di Indonesia hasil kerja sama Indonesia dengan perusahaan asing. Termasuk di dalamnya mendorong terciptanya vaksin booster yang bisa meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa.

Sambil menunggu pemulihan penuh dari wabah Covid-19 dan status penyakit ini menjadi *endemic disease*, atau malah berbalik terjadi *third wave attack* seperti yang dialami beberapa negara Eropa, Budi telah mengantisipasinya dengan ketat. Hingga pertengahan November, Budi setidaknya memelototi 3 varian baru yang berkembang di Eropa yang membuat negara itu harus *lock down* lagi.

“Jadi kita selalu monitor sekarang varian-varian baru apa saja yang berbahaya, dan kita sudah lihat sekarang 4 varian baru Lamda, Mu, C.1.2 dan Omicron, ini adalah varian baru yang juga menjadi perhatian WHO, dan memiliki beberapa mutasi berbahaya. Jadi kita kontrol jangan sampai varian baru ini masuk ke Indonesia dengan kita perkuat perbatasan-perbatasan kita,” ujar Budi dalam sebuah webinar pertengahan bulan November 2021. Karena itu Budi selalu waspada dan bersiap-siap dengan segala kekuatan yang ada.

Cepat atau lambat wabah ini akan berakhir. Sektor kesehatan tetap harus ditingkatkan demi menciptakan sumber daya manusia yang handal, dalam sebuah agenda transformasi sektor kesehatan. Peta kesehatan ini menurut Budi akan menjadi pedoman kementeriannya dalam membangun sistem kesehatan nasional demi peningkatan sumber daya manusia.

Budi memaparkan enam bidang utama



sebagai agenda transformasi kesehatan yang akan dikejar pemerintah setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Pertama adalah transformasi layanan kesehatan primer, seperti peningkatan peran pusat kesehatan masyarakat (PUSKEMAS) klinik-klinik kesehatan. Layanan tersebut menurut Budi harus terus dibantu untuk layanan yang sifatnya *promotive* dan *preventive*. Agenda transformasi kedua adalah membenahi layanan rujukan dengan cara meningkatkan akses dan keterbukaan rumah sakit, kualitas layanan pada pasien, misalnya menghindari antri untuk mendapatkan pelayanan yang lama, sehingga jangan sampai terjadi malah pasiennya mencari layanan ke luar negeri.

Transformasi yang ketiga berupa pembenahan menyeluruh pada sistem ketahanan kesehatan nasional agar siap menghadapi berbagai kondisi termasuk yang terburuk sekalipun. Misalnya bagaimana kita siap mengantisipasi negara kita



“Jadi kita selalu monitor sekarang varian-varian baru apa saja yang berbahaya, dan kita sudah lihat sekarang 3 varian baru Lamda, Mu, dan C.1.2, ini adalah varian baru yang juga menjadi perhatian WHO, dan memiliki beberapa mutasi berbahaya. Jadi kita kontrol jangan sampai varian baru ini masuk ke Indonesia dengan kita perkuat perbatasan-perbatasan kita.”

Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan RI

yang sering bencana baik bencana alam dan non alam. Transformasi keempat adalah berkenaan dengan sistem pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dan masuk akal termasuk pembenahan asuransi kesehatan nasional. Kelima adalah transformasi di bidang sumber daya, jumlah tenaga kesehatan, sebaran sumber daya manusia, dan kualitas dan mencukupi untuk layanan ke masyarakat. Keenam adalah transformasi bidang teknologi dan bio-teknologi yang mempengaruhi praktek kesehatan nasional. Misalnya bagaimana system pengobatan akan lebih personal dan bersifat pencegahan (*preventive*) dan tepat sasaran (*precise*).

KONEKSI GLOBAL

Kalau urusan mencari untung, memimpin lembaga perbankan dan keuangan moderen, mencari celah-celah bersaing di sektor perbankan yang kompetitif sampai pada modern *financing*

strategy sampai level tertinggi dan *complicated* Budi sudah sangat paham. Dia terbukti telah menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di bank nasional terbesar tersebut untuk waktu yang cukup lama dan berhasil membawa bank tersebut menjadi bank nasional dengan asset terbesar Rp 1.450,9 triliun per Agustus 2021.

Selepas dari Bank Mandiri, Budi mendapat tugas yang cukup menantang yakni memimpin restrukturisasi BUMN pertambangan nasional PT Inalum. Dia sukses mengakuisisi 51% saham Freeport dengan lancar tanpa gejolak. Semua orang paham bahwa dia adalah orang yang tepat untuk tugas itu karena pengalaman dan relasinya dengan lembaga keuangan global, *hedge fund* hingga *super rich people* yang namanya bahkan jarang diketahui publik. Mereka ini rata-rata menjadi pengendali hampir 70% keuangan global dan wajahnya tidak pernah muncul dalam kilauan media (*media spotlight*).

Memikirkan Ulang Pengelolaan Negara

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Dr Moeldoko selalu optimis akan masa depan bangsa Indonesia. Krisis kesehatan dan ekonomi selama hampir 2 tahun belakangan ini secara langsung atau tidak akan mengubah banyak hal dengan puncaknya pada kesiapan sebagai bangsa untuk memikirkan ulang strategy mengurus negara (*state governance*) terutama di bidang kesehatan dan ekonomi dan juga bidang lain yang saling berkaitan satu sama lain.

Sebagai negara, Moeldoko melihat ada lima ancaman (*threats*) serius yang dihadapi peradaban moderen dan mempengaruhi pengelolaan sebuah negara; perubahan (*changes*) yang terus terjadi, kecepatan perubahan (*speed*), risiko-risiko yang makin beragam dan multi dimensional, kompleksitas persoalan yang makin beragam (*complexity*) dan yang mengerikan sering terjadinya berbagai kejutan (*surprise*) sehingga ketidak pastian makin membesar (*uncertainty*) dan berdampak pada cara sebuah pemerintahan mengurus negaranya. “Seperti kata Presiden Joko Widodo, bahwa kita harus “membajak” situasi untuk membuat lompatan besar berikutnya,” kata Moeldoko meniru ucapan Sang Presiden.

Kendati banyak compang-camping dalam implementasi kebijakan di lapangan, karena berbagai kondisi –dan menyadari tantangan besar otonomi daerah—Moeldoko sangat menyadari tantangan memberitakan “kabar baik” dari pemerintah kepada publik makin besar. Dia menyadari sebaik apapun kerja pemerintah tidak bisa sepenuhnya ditanggapi positif oleh khalayak ramai. Tak jarang misalnya Kantor Staf Presiden yang salah satu tugasnya mengkoordinasi komunikasi publik pemerintah harus mengelus dada karena rekan-rekan mereka di pemerintah bekerja agak lamban dan masih menerapkan pola kerja sama. Padahal jaman sudah berubah dan media pun makin beragam. Untuk itu dia menghimbau rekan-rekannya terutama yang menghandle komunikas publik di setiap instansi

pemerintah untuk lebih responsive terhadap perubahan dan budaya kerja baru.

Belum lama ini, Komisioner Informasi Pusat dan pemimpin redaksi majalah BUKA, Roman N Lendong, bersama tim duduk bersama mendiskusikan berbagai topik terutama mengenai masa depan bangsa pasca Pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini dengan tangkas menjawab dan berdiskusi berbagai issue kebangsaan muthakhir serta modal dan potensi bangsa yang membuat kita tetap optimis.

Bagaimana kita membangun optimisme bangsa dengan di tengah situasi dan kondisi yang berat setahun belakangan ini?

Saya sangat optimis. Walaupun begitu, kita semua harus tetap menyadari bahwa perekonomian bisa pulih jika pandemi terkendali. Kita berharap ketika pandemi ini sudah terkendali, maka secara bertahap aktivitas ekonomi bisa dibuka kembali. Yang membuat kita sangat optimis adalah positivity rate kita yang semakin membaik. Pada July- Agustus, positivity rate Indonesia masih di atas 15%, namun per 6 September sudah turun di sekitar 6,97%. (Bulan November sudah di bawah 5%). Tinggal sebentar lagi kita akan mencapai batas 5% yang menurut World Health Organisation





(WHO) artinya situasi sudah mulai terkendali. Tapi meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lagi. Untuk itu protocol kesehatan betul-betul diikuti dan tidak boleh kendor untuk alasan apapun.

Inisiatif dan upaya apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan Indonesia paska pandemi, dari sisi mengurangi penyebaran virus, pengobatan, maupun proses membangun kesadaran publik?

Pertama, angka testing dan tracing masih harus kita tingkatkan. Semakin tinggi angka testing dan tracing maka akan semakin cepat kita mendeteksi mereka yang positif sehingga kita bisa segera rawat mereka agar tidak sampai mengalami gejala yang berat. Kedua, teknologi digital, berupa aplikasi seperti Peduli Lindungi yang digunakan untuk memetakan penyebaran covid, semakin masif digunakan. Tentu, dengan kondisi ketimpangan teknologi dan akses jaringan yang masih ada, aplikasi ini tidak bisa dipaksa untuk digunakan seperti halnya di daerah yang sudah punya penetrasi teknologi yang sudah memadai,

seperti misalnya mall, rumah sakit, rumah ibadah, kawasan industry dan pusat olahraga. Di daerah seperti ini aplikasi ini wajib digunakan. Kita juga harus wajib menerapkan screening berbasis teknologi Peduli Lindungi. Ketiga vaksinasi semakin masif dilakukan. Tahun ini sasaran kita adalah 208 juta penduduk harus sudah menerima vaksin. Untuk itu pemerintah mengejar target agar cakupan vaksinasi di Jawa dan Bali bisa mencapai 1,5 juta orang/hari dan luar Jawa mencapai 1 juta per hari. Keempat, dan yang paling penting adalah gotong royong seluruh masyarakat Indonesia untuk disiplin protokol kesehatan terutama penggunaan masker.

Dari kondisi yang kita alami selama hampir 2 tahun ini, banyak pelajaran baik yang bisa dipelajari. Menurut pandangan bapak, bagaimana kondisi ini menumbuhkan sikap positif terhadap masa depan bangsa?

Tentu pandemi ini bisa dilihat sebagai musibah, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi seluruh dunia dan lintas peradaban. Begitu banyak orang yang menderita secara langsung atau tidak langsung akibat bencana ini. Jika dipaksa mencari sisi positif maka pandemi ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar kita semakin dekat denganNya.

LAPORAN UTAMA

Kekuatan manusia sangatlah terbatas, jika Tuhan mengijinkan maka barang sekecil virus pun bisa menghancurkan peradaban manusia. Dari segi pemerintahan, pandemi ini mengajarkan kita, cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi. Sebelum pandemi, harus diakui bahwa data sebaran penyakit biasanya tersedia 1 tahun sekali. Data ini biasanya membandingkan jumlah penderita demam berdarah (DB), tuberculosis (TBC) malaria dari tahun ke tahun.

Situasi pandemi ini membuat pemerintah jungkir balik, kita dituntut harus bisa memantau perkembangan penyakit per hari. Bukan hanya jumlah kasus yang dipantau per hari, tapi juga kapasitas tempat tidur, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan oksigen, distribusi vaksin, sampai tingkat kedisiplinan warga menggunakan masker dan mengendalikan mobiltas penduduk. Selain itu, juga kita perlu mengevaluasi seluruh infrastruktur kesehatan nasional, mulai dari kapasitas rumah sakit, obat-obatan, sumber daya manusia, system informasi kesehatan nasional dan lain sebagainya. Dari sisi rasio jumlah dokter per penduduk misalnya, sudah lama kita tidak melakukan evaluasi. Rasio dokter/pasien di Indonesia masih 4:10,000 artinya hanya 4 orang dokter melayani 10 ribu penduduk atau seorang dokter harus melayani 2.500 penduduk. Sebagai perbandingan di Singapore, 1; 500 pasien. Saat kondisi pademi ini, Indonesia setidaknya kekurangan 3000 orang dokter.



“Bagi saya, keterbukaan informasi adalah landasan utama untuk mewujudkan kolaborasi dan gotong royong. Oleh karenanya, tidak perlu ada data yang disembunyikan pemerintah, dan harus disampaikan secara terbuka dan jujur ke publik beserta penjelasannya. Semua informasi dibuka seluas-luasnya ke publik melalui media yang ada, baik cetak dan terutama melalui digital, seperti website milik pemerintah. Semua pihak bisa mengakses informasi tersebut dengan gratis, dan digunakan untuk disebarluaskan kepada berbagai kalangan.”

Jenderal (Purn) Dr Moeldoko,
Kepala Staf Presiden

Kebijakan apa saja yang sudah dan sedang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi dalam jangka panjang kendati status pandemiknya berubah menjadi endemic?

Saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemic. Salah satu faktor yang harus dihitung secara matang adalah munculnya varian baru. (Saat penulisan, Indonesia sangat siaga atas munculnya varian selain Delta yaitu Mu, dan menurut beberapa beberapa kalangan ilmuwan, varian ini agak kebal terhadap vaksin). WHO mengingatkan adanya varian baru yang lebih menular dan lebih ganas sehingga kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah akan berbasis ilmu pengetahuan dan data.

Tingkat Keterbukaan Informasi sama pentingnya dengan upaya penanganan penularan maupun pengobatan virus itu sendiri. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke publik untuk kemajuan implementasi keterbukaan informasi di Indonesia?

Pemerintah sangat menyadari dan yakin bahwa bukan kebijakan pemerintah yang menentukan sukses atau gagalnya kita menghadapi pandemi ini. Ini bergantung pada peran serta dukungan dari masyarakat. Kebijakan percepatan vaksinasi akan percuma kalau tidak didukung oleh masyarakat. Penyebaran fisik dan sosial sekeras apapun pasti membuat orang mencari alternatif jalan lain (jalan tikus) yang meningkatkan mobilitas warga. Kemenangan melawan Covid-19 yang masih berstatus pandemic ini bukan ditentukan oleh satu atau dua pihak, namun diperlukan gotong royong seluruh elemen bangsa. Bagi saya, keterbukaan informasi adalah landasan utama untuk mewujudkan kolaborasi dan gotong royong.

Oleh karenanya, tidak perlu ada data yang disembunyikan pemerintah, dan harus disampaikan secara terbuka dan jujur ke publik beserta penjelasannya. Semua informasi dibuka seluas-luasnya ke publik melalui media yang ada, baik cetak dan terutama melalui digital, seperti website milik pemerintah. Semua pihak bisa mengakses informasi tersebut dengan gratis, dan

digunakan untuk disebarluaskan kepada berbagai kalangan.

Memang dalam beberapa kasus, ada perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah lalu ada juga perdebatan misalnya akurasi data kematian. Namun pemerintah sepanjang yang diketahui telah berusaha tidak menutupi untuk mencegah berbagai spekulasi. Kendati ada perbedaan dan kekurangan, pemerintah juga secara terbuka dan jujur ingin memperbaiki data ini di masa depan. Jaman dulu, orang harus ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meng up date misalnya soal penularan penyakit. Namun di jaman keterbukaan dan teknologi ini polemik soal data pasti akan terjadi. Sebelum mempublikasikan ke publik BPS proses pengumpulan data memakan waktu dan tenaga yang besar. Setelah data-data dikumpulkan di lapangan, lalu data tersebut di *cross check*, lalu pengecekan ulang (*double check*) oleh BPS dipublikasikan. Di era yang serba cepat ini, karena tuntutan kecepatan, maka terjadinya error maupun perbedaan penafsiran besar kemungkinan terjadi. Proses pengumpulan data bersifat harian. Data seluruh Indonesia dikumpulkan hingga malam dan keesokannya sudah harus diunggah ke platform online. Jadi menurut saya wajar saja kalau ada perbedaan-perbedaan dalam penyajian data maupun interpretasi pada data.



Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, menyadari kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 sudah berada di jalur yang benar. Ada harapan besar akan masa depan bangsa sambil memperjuangkan kemandirian di bidang ekonomi dan terutama di bidang kesehatan nasional.

Agung adalah politisi senior yang terus lantang memperjuangkan dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga kemandirian di bidang ekonomi. Tidak hanya dalam ucapan, tapi dipraktekkan dalam keluarganya sendiri. Dengan kapasitas yang dimilikinya, dia mendorong penggunaan temuan tenaga ahli dalam negeri untuk kesehatan. Belum lama ini, ketika menghantar sang istri untuk terapi digital subtraction angiography (DSA) di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto—populer disebut terapi cuci otak oleh Dr Terawan—Agung bertemu dengan mantan menteri kesehatan tersebut dan menawarkan penyuntikan vaksin nusantara.

Tanpa berpikir lama Agung menyorongkan lengannya untuk pengambilan sample darah. Setelah satu minggu, sel darah dendritic yang telah diproses disuntikan kembali ke dalam tubuhnya. “Badan terasa lebih enteng dan enak. Dan yang penting cukup dilakukan sekali seumur hidup. Sebagai seorang dokter, saya melihat metode vaksinasi atau pengobatan ini lebih sehat,” kata Agung, seraya mendukung pengobatan ini bisa diperluas penggunaannya di kemudian hari.

Politisi dari Partai Golkar ini yakin sekali bahwa hanya dengan negara yang utuh semua agenda kebijakan kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik. Sikap toleransi antara golongan masyarakatpun misalnya menurut Agung harus bisa diterapkan secara proporsional dan obyektif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan golongan tanpa melihat preferensi mayoritas dan minoritas misalnya.

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agung ingin bekerja secara optimal, tidak hanya sekedar keranjang untuk menampung para pensiunan. Dia bersyukur bahwa secara politis Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh “menganggap” mereka.





“Presiden berharap banyak kepada kita untuk memberikan nasihat dan pertimbangan yang benar-benar origin, inovatif dan bahkan tidak pernah dipikirkan oleh jajaran eksekutifnya termasuk para menteri,” kata mantan Ketua DPR 2004-2009 ini soal perannya sebagai penasihat presiden. Karenanya biar, efektif organisasi kerjanya diback up oleh para ahli dalam berbagai bidang. Salah seorang dari sekian pakar yang membantu mereka misalnya Profesor C.A Nidom, salah seorang ahli *biology molecular* yang sangat aktif memberikan pertimbangan mengenai penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negeri.

Sebagai pejabat negara, Agung memberikan contoh kepada publik ketika menikahkan anaknya beberapa waktu lalu. Kendati “tidak biasa” namun acara pernikahan yang dihadiri tidak lebih dari

20 tamu undangan ini justru memberikan kesan mendalam dan bisa menjadi trend baru di masa depan. “Tidak melelahkan, ucapan bahagia dari undangan termasuk misalnya dari President Joko Widodo bisa disampaikan secara virtual,” kata Agung. Kendati demikian ada satu “hilang” pada interaksi sosial sang cucu dengan teman-teman sekolahnya, karena kegiatan belajar dilaksanakan secara dalam jaringan (on line). Tetapi semua dihadapi dengan senyum.

Agung menambahkan sebagai anggota dewan pertimbangan president, dia rutin melakukan meeting dengan presiden, kendati saat ini banyak dilakukan secara virtual. Secara pribadi dia sangat respek dengan Presiden Joko Widodo yang menurutnya masih bisa dipegang integritasnya. “Jarang loh kita punya presiden kayak dia,” aku Agung.

LAPORAN UTAMA



DOUBLE TRACK APPROACH

Agung Laksono, kenyang makan garam dalam politik dan pemerintahan. Sejak era reformasi, Agung sudah pernah menjabat berbagai posisi penting di beberapa kabinet, dalam beberapa era pemerintahan. Sebagai seorang yang pernah sekolah di bidang kedokteran—Agung menamatkan pendidikan kedokteran di Universitas Kristen Indonesia Jakarta—dia paham betapa sektor kesehatan memperlihatkan boroknya selama menanggapi pandemi Covid-19. Dia sangat yakin hanya dengan kesehatan prima sebuah bangsa akan bisa produktif dan menggerakkan mesin ekonominya. Inilah yang disebut sebagai *double track approach*, di mana kesehatan dan ekonomi harus dijalankan bersamaan.

“Saya kira apa yang dilaksanakan pemerintah sudah pas. Kita sukses menggerakkan dua sektor yakni kesehatan dan ekonomi secara seimbang. Dalam menanggapi pandemi, mengurangi penderita dan menekan akan kematian, kemudian mengurangi penularan baru sudah baik. Kita sama-sama bodoh dan gak ada pengetahuan dan pengalaman memadai sehingga semua gagap. Namun di bidang ekonomi Indonesia tidak sampai tumbang, bahkan tengah semester sudah mencatatkan pertumbuhan,” kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Dia melihat solidaritas sosial secara spontan muncul, baik dalam negeri maupun kerja sama lintas negara, membagi best practice masing-masing negara. Pemerintah juga telah bijak misalnya menghindari lock down total seperti

yang diterapkan beberapa negara. Selain butuh dukungan finansial yang sangat kuat karena harus mengkompensir warga karena lock down, negara juga butuh kenyamanan sosial dalam arti yang luas. Menurut dia keputusan melarang mudik, beribadah di rumah saja adalah bagian dari upaya mencegah penularan wabah ini.

Pada saat bersamaan *track economy* juga tetap berjalan meski dengan berbagai pembatasan, atau dengan mengubah pola kerja seperti work from home yang kini menjadi budaya industri baru di era teknologi. “Sebagai anggota dewan pertimbangan Presiden kita sudah melihat kebijakan yang diambil adalah pilihan terbaik di saat emergency,” kata mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada era pemerintahan BJ Habibie ini.

Dari sisi industri kesehatan, dia sepakat dengan pandangan banyak pihak yang menginginkan percepatan kemandirian sektor tersebut, dengan mempercepat pembangunan industri hulu (*up-stream*). Khusus supply tenaga kesehatan dia melihat ketimpangan jumlah ahli di Indonesia. Sebagai orang yang paham dunia kedokteran, dia menyadari langkanya ahli paru-paru yang sangat dibutuhkan saat pandemi ini. Demi tujuan itu misalnya semua pendidikan kedokteran harus lebih merata di seluruh Indonesia untuk mencetak dokter yang ahli dan handal.

Sambil menunggu pabrik petro chemical berjalan, Agung yakin bahwa secara parsial seperti Vaksin Nusantara karya Dr Terawan dan kawan, serta Vaksin Merah Putih perlu segera didukung. Apa mau dikata, dominasi pemain asing dalam industri farmasi masih sangat kental,

apalagi didukung oleh mafia dalam negeri.

Demikian juga industry penunjang lain di bidang kesehatan yang bisa segera dibuka secara luas. Memang dia melihat, ada hambatan regulasi menyebabkan pelaksanaan vaksin nusantara ini belum terlaksana. Saat ini hanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lah yang punya otoritas untuk membolehkan produk obat dan makanan masuk ke pasar. Seandainya kementerian kesehatan misalnya punya wewenang yang sama tentu proses perijinan vaksin ini akan mungkin lebih mudah.

Menurut informasi yang didapatkannya di lapangan, bahwa ketika Vaksin Nusantara dipakai secara masal makan harganya akan semakin terjangkau, sekitar \$10 atau setara Rp145 ribu untuk satu kali suntik.

OTSUS PAPUA, MAKSIMALISASI PERAN KIP DAN TOLERANSI

Sambil menebar optimisme masa depan bangsa pasca Covid-19 Agung sangat memperhatikan secara khusus perkembangan Otonomi Khusus Papua yang sudah diperpanjang tahun ini. Dia melihat evaluasi pelaksanaan otonomi Papua perlu dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurut pengamatannya—dan issue ini juga yang diutarakan berkali-kali kepada Presiden dalam proses konsultasi dan pertimbangan—dana yang dikucurkan ke Papua belum menunjukkan hasil yang efektif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dana kurang lebih Rp120 triliun yang telah dikucurkan hanya menghasilkan birokrat yang korup dan hanya sedikit yang dinikmati rakyat banyak. Ke depan menurut Agung penyaluran dana Otsus bisa ditempuh melalui mekanisme politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik itu berupa Dana Alokasi Khusus/ Dana Alokasi Umum yang perencananya lebih matang dan dipantau pemerintah pusat. Agung melihat, seandainya dana tersebut selama ini untuk membangun bendungan/dam atau jalan raya sudah berapa banyak yang sudah terbangun.

Kepada Komisi Informas Pusat (KIP) Agung juga berharap banyak untuk mempromosikan keterbukaan, bukan saja pada saat anggaran itu dilaksanakan di tingkat eksekutif. Yang lebih penting justru pada saat proses perencanaan di DPR di komisi anggaran, ketika anggaran ini digodog.

Selain itu dia juga mendorong agar KIP lebih berperan mempromosikan transparansi proses perijinan yang selama ini terkesan masih sangat tertutup. Misalnya harus disampaikan ke publik

“Saya kira apa yang dilaksanakan pemerintah sudah tepat. Kita sukses menggerakkan dua sektor yakni kesehatan dan ekonomi secara seimbang. Dalam menanggapi pandemi, mengurangi penderita dan menekan akan kematian ,kemudian mengurangi penularan baru sudah baik. Kita sama-sama bodoh dan gak ada pengetahuan dan pengalaman memadai sehingga semua gagap. Namun di bidang ekonomi Indonesia tidak sampai tumbang, bahkan tengah semester sudah mencatatkan pertumbuhan.”

Agung Laksono,
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

siapa saja yang mengajukan ijin investasi untuk industry tertentu di daerah tertentu. Dengan ini misalnya, selain mencegah permainan duit juga mencegah terjadinya perijinan yang hanya pada sektor tertentu saja, tanpa melihat kebutuhan riil perekonomian Indonesia secara umum.

Di bidang sosial budaya Agung melihat bangsa Indonesia punya modal gotong royong yang membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Demikian juga organisasi sosial yang ada di masyarakat bisa bekerja sama dengan baik. Kendati demikian, dia menyadari adanya bibit ekstrimisme dalam masyarakat yang bisa menjadi benih perpecahan bangsa. “Semangat toleransi jangan hanya diwajibkan pada kaum minoritas saja, kaum mayoritas juga harus sama mempraktekannya,” tegas Agung.

Agung menyadari banyak pihak yang masih sinis dengan apa yang dikerjakan pemerintah baik ketika menanggapi pandemi maupun dalam program-program lainnya. Bahkan, Agung mengakui di sekitar Istana Presiden, juga terdapat individu yang juga skeptis dan selalu sinis terhadap kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo, menurut Agung juga sangat paham akan situasi kebatinan masyarakat termasuk aparat birokrasi. Namun dia yakin bangsa ini akan terus berjalan dan pemerintah akan terus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Equilibrium Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat

Seberapa efektifpun kebijakan dan dana pemerintah dalam peperangan melawan Covid-19, peran serta masyarakat juga tak kalah pentingnya. Karena itu perlu keseimbangan antara keduanya.

Politisi Melkiades Laka Lena bersuara lantang mengadu gagasan di ruang publik setahun belakangan ini. Selain mempertanyakan dan mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani badai Covid-19 selama hampir 2 tahun belakangan ini, Melki juga terjun langsung ke lapangan menyapa pasien atau tenaga kesehatan yang bekerja siang malam merawat pasien SARS COV-2 ini. Ketika wabah ini pertama kali menyerang Wuhan, China Melki dan rekan-rekannya langsung berinisiatif menyambut warga Indonesia yang dievakuasi dari sana. Melki dan kawan-kawan menyapa dan merangkul warga yang selesai karantina di beberapa tempat termasuk mereka yang diisolasi di Pulau Natuna dan di beberapa tempat di Jakarta pada awal 2020.

Begitu, ada pasien di Indonesia terkonfirmasi pertama kali di awal Maret 2020, Melki giat bekerja sesuai perannya di parlemen memelototi kinerja pemerintah, dan mendukung berbagai inisiatif untuk mengatasi penyebarannya pandemi ini. Apa daya, karena belum berpengalaman, seperti negara lainnya, beberapa kali pemerintah Indonesia keteteran sampai sekarang sudah memperlihatkan hasil yang positif. Melki bisa memaklumi kondisi ini. Secara kelembagaan, DPR/MPR tidak hanya berwacana. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/RI) membentuk Tim Pengawas Untuk Penanganan Covid-19 serta satuan tugas (Satgas) yang lebih operasional teknis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR tersebut menyadari, wabah covid-19 ini sangat menguras tenaga,

pikiran, perasaan, emosi dan pengorbanan jiwa dan pengorbanan lainnya. Melki dan teman-teman termasuk yang berada di garda terdepan bersama lembaga eksekutif seperti Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan tentu kementerian kesehatan bekerja sama sesuai peran masing-masing.

Terlihat dalam beberapa kesempatan Melki dan rekan-rekannya beradu gagasan dan bersitegang dengan BPOM sehubungan dengan proses persetujuan dan izin edar beberapa obat dan terutama vaksin yang datang dari luar negeri. Juga yang sedang diinisiasi oleh beberapa pihak di tanah air termasuk vaksin nusantara dan merah putih. Dengan semangat menuju kemandirian obat dan vaksin, politisi yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur ini keukeuh bahwa vaksin nusantara bakal bisa disandingkan dengan produk asing yang membanjiri Indonesia, terutama vaksin yang telah mengurus keuangan negara. Dengan kementerian tenaga kerja, Melki dan kawan-kawan lantang memperjuangkan kompensasi bagi karyawan yang dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan terutama tentunya dengan kementerian kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah tersebut.

PEMERINTAH BERSAMA MASYARAKAT

Politisi partai Golkar ini yakin sekali, tanpa partisipasi masyarakat apapun upaya pemerintah dan seberapa besarpun dana yang dikucurkan tanpa partisipasi aktif masyarakat, dipastikan



keberhasilannya tidak optimal. Karena itu menurut Melki perlu ada keseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan inisiatif tingkat individual, kelompok, daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

Kendati kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat telah diambil melalui misalnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari skala mikro sampai nasional, dia melihat sulit bisa mengontrol masyarakat 100%. Menurutnya, Indonesiapun tidak bisa berdalih hingga berbohong atas kecerobohan yang dibikin warganya. Organisasi kesehatan dunia WHO misalnya beberapa waktu lalu memperingatkan Indonesia karena dianggap lalai mengontrol mobilitas warga.

Apa mau dikata, fakta-faktnya bisa dipantau secara riil melalui teknologi. Hal itu bisa terlihat dari pantauan satelit misalnya melalui google, dengan mudah melaporkan tingkat kepadatan orang di tempat tertentu. "Gambaran ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat

dalam memerangi pandemi ini,"kata alumni Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta ini.

Melki sepakat dengan banyak orang yang mendorong kemandirian industri nasional di bidang kesehatan. Dia sendiri bersama beberapa anggota DPR secara terbuka mengendorse vaksin yang sedang dipersiapkan seperti vaksin Nusantara atau Merah Putih yang memasuki tahapan uji laboratorium tahap dua menuju uji klinis lanjutan. Demikian juga metode lain yang mungkin saja akan lebih efektif mengatasi penyebaran virus ini.

Secara politik kata apoteker ini, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden NO 6/2016 yang ingin mempercepat kemandirian industri kesehatan nasional. Untuk itu dia mengajak para pembantu presiden segera mem follow up keputusan ini dengan misalnya membuat road map pembangunan industri hulu.

Demikian juga dengan industri pendukung yang sudah mulai dirintis dan bahkan sudah mulai dipakai beberapa waktu lalu seperti G-Nose,

LAPORAN UTAMA



bikinan UGM yang dipakai untuk men screening kondisi seseorang. Sayang, belakangan ini kelihatannya kurang terlihat kemajuannya. Test antigen dan polymerase chain reaction (PCR) masih lebih banyak dipakai sebagai salah satu sarat untuk perjalanan dan atau pertemuan di lingkungan tertentu.

DUKUNGAN PUBLIK

Sebagai seorang apoteker, Melki sadar bahwa industry farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor bahkan mencapai 90%. Pengaruh dinamika ekonomi dan politik global sangat berperan dalam perkembangan industry ini di dalam negeri, karena berkenaan dengan supply chain bahan baku.

Karena itu dukungan politik dan peran serta masyarakat sangat penting agar gagasan kemandirian industry farmasi bisa tercapai. Sadar atau tidak, preferensi dalam praktek politik global tak bisa ditutupi. Inggris sebagai produsen vaksin Astra Zeneca misalnya kebanyakan memprioritaskan negara-negara yang secara diplomasi internasional lunak dengannya. Demikian juga China yang mengutamakan

pemasaran Sinovac pada negara-negara yang telah lama menjalin hubungan ekonomi dan bisnis yang selama ini telah berjalan lancar. Dan itu wajar-wajar saja.

Untuk itu, di tingkat lokal dan demi memuluskan produk lokal, Melki dan teman-temannya mendukung berbagai inisiatif untuk memproduksi obat, ataupun upaya lain demi mencegah dan mengobati penyakit seperti Covid-19 ini. Demi mendukung vaksin nusantara misalnya, selain membela secara terbuka inisiatif oleh Dr Terawan dan kawan, dia pun giat mempromosikan metode lain yang bisa digunakan untuk memerangi virus ini.

Namun dia berharap vaksin Merah Putih atau Nusantara nantinya bisa diterima di pasar internasional dan itu tentu saja akan menguntungkan posisi geopolitik dan strategis Indonesia. Dan tentu secara medis, vaksin tersebut harus memenuhi standar seperti, aman, efektif dan berkasiat meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap virus.

Melki optimis dengan berkaca pada dukungan publik pada peraih medali Olympiade Tokyo 2020, dia pun yakin produk obat-obatan dan

vaksin nusantara ini akan didukung masyarakat. Dengan terlibatnya beberapa tokoh publik yang menerima vaksin nusantara—kendati belum disertifikasi BPOM—dia yakin itikad baik ini akan diterima konsumen khususnya dan terutama demi membangkitkan kebanggaan kita pada produk lokal. Kendati harus berbenturan dengan berbagai kalangan yang masih sinis akan kemampuan bangsa menghasilkan produk yang baik Melki pantang surut demi menegakkan rasa bangga di kancah internasional. “Kami minta kepada semua pihak untuk jangan membunuh inisiatif lokal untuk membikin vaksin atau obat yang dibutuhkan saat ini. Kalau inisiatif seperti vaksin nusantara ini berhasil maka kita menjadi satu dari sekian bangsa yang telah mampu berdiri di atas kaki sendiri—kendati sebagian orang enggan menyebutnya sebagai vaksin,” kata Melki. Karena Melki membela vaksin domestik ini secara terbuka tak kurang banyak orang yang mengeritik dan sinis terhadap mereka dan koleganya. Dia maju terus kendati vaksin dendritik ini masih pada tahap uji laboratorium.m

Di level partisipasi masyarakat, Melki dan kawan-kawan di dewan sepakat bahwa disiplin dan upaya pencegahan penularan harus sampai level terendah seperti rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau kampung. Dengan itu, penduduk di daerah tersebut mampu secara mandiri mengontrol keluar masukarganya. Misalnya ada warga luar yang terbukti positif maka dia harus dikarantina di tingkat paling bawah. “Jika misalnya dia menginap di wilayah tersebut lebih dari satu malam misalnya maka dia harus menunjukkan test antigen yang negative, dan jika positif maka orang tersebut langsung di lock agar memutus rantai penyebarannya,” akunya.

Kunci mencegah meluasnya wabah ini menurut Melki, tergantung pada partisipasi publik. Dengan melibatkan kelompok sosial, pegiat media sosial, agama hingga grass root, seperti yang dilakukannya di daerah Nusa Tenggara Timur, program pencegahan dan vaksinasi berhasil dengan baik. Karena itu dia juga mendorong pemerintah utamanya di level regional hingga lokal untuk tidak “sok tahu” dan terus melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dengan menggerakkan kelompok masyarakat yang sudah ada. Dan sarana untuk itu sudah sangat mudah digunakan misalnya dengan menggunakan sarana social media.

Anggota DPR 2019-2024 ini menyadari peran media sangat penting bagi keberhasilan program pemerintah. Terutama di saat media sosial begitu mendominasi, maka pemerintahpun harus peka

“Kami minta kepada semua pihak untuk jangan membunuh inisiatif lokal untuk membikin vaksin atau obat yang dibutuhkan saat ini. Kalau inisiatif seperti vaksin nusantara ini berhasil maka kita menjadi satu dari sekian bangsa yang telah mampu berdiri di atas kaki sendiri—kendati sebagian orang enggan menyebutnya sebagai vaksin.”

Melkiades Laka Lena
Politisi Partai Golkar

dan bisa merespons perkembangan media dan digunakan secara efektif untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan yang penting supaya masyarakat patuh pada protokol kesehatan (prokes) yang sudah diketahui bersama. “Ada dua tipe masyarakat, pertama adalah memang mereka tidak punya informasi yang memadai maka mereka bisa saja melanggar prokes tanpa sengaja. Menghadapinya dengan terus melakukan edukasi. Namun ada juga tipe masyarakat yang kedua yang sudah tahu tapi dengan sengaja melawan kebijakan yang ada, dan terhadap orang-orang jenis ini harus diatasi dengan perangkat hukum yang berlaku,” katanya.

Kendati angka infeksi dan kasus aktif memperlihatkan trend yang menurun, Melki sepakat dengan semua pihak—terutama dengan pemerintah bahwa kewaspadaan masih diutamakan. “Ini baru trend yang menurun, dan jika kita lengah angka penularan bisa berbalik lagi dan akan jadi masalah buat kita semua. Kendati demikian kita terus berharap bahwa wabah ini akan segera berakhir menyosong masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Melki.



Para Penabur Harapan

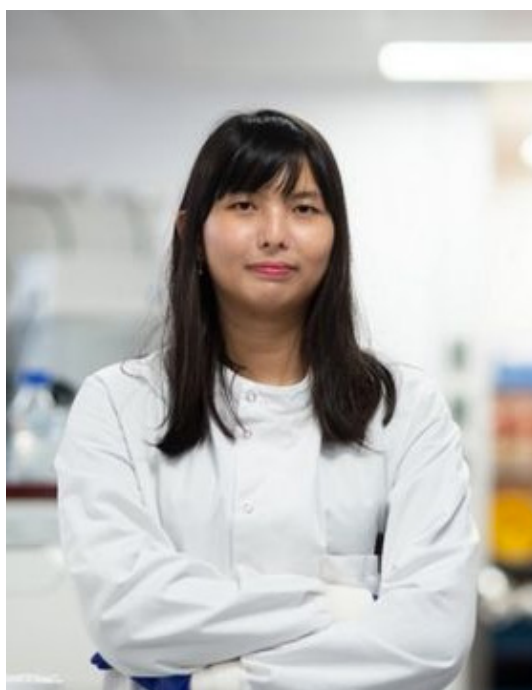
Di tengah rasa pilu, cemas, takut, putus asa, penuh keraguan dan kegamanangan karena tak tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, muncul kisah-kisah menarik dari seantero Indonesia yang bisa merangkai harapan akan masa depan Indonesia. Bahwa kita mampu mengatasi situasi darurat jika kita mengeksplor potensi yang kita miliki.

Antara lain misalnya pertengahan bulan September, Indonesia sudah berada di peringkat 6 dunia oleh World Health Organization (WHO) sebagai negara yang berhasil menekan penularan virus Covid-19. Pujian dan keheranan datang silih berganti berganti. Negara tetangga Malaysia, para politisi menjadikan kesuksesan Indonesia sebagai bahan kampanye politik menyerang lawan-lawannya. Mengapa tidak seperti Indonesia yang dengan sejumlah tantangan yang dihadapinya mampu membuat virus ini jinak.

Pada sidang umum Global Covid-19 Summit

yang berlangsung di New York, pada akhir bulan September 2021, Presiden Joko Widodo diundang secara khusus oleh Presiden Joe Biden untuk saling tukar pengalaman menanggapi Covid-19. Bukan tanpa alasan, hingga saat ini Amerika masih menjadi epicentrum penyebaran virus yang cukup mematikan ini. Sementara Indonesia sudah menuai banyak pujian walau cemas masih mengantui sebagian besar rakyat Indonesia.

Tentu saja pada event itu Jokowi bersama 4 pemimpin dunia lainnya berbicara berbagai agenda antara lain pertama mendorong percepatan vaksinasi. Tahun ini targetnya 40% penduduk dunia harus sudah divaksin. Kedua bagaimana menyelamatkan nyawa manusia dari kematian yang telah mencapai 4 juta orang hingga akhir tahun. Dan yang penting adalah membangun arsitek kesehatan masa depan yang lebih handal dan mumpuni termasuk menghadapi wabah yang tak pernah terduga (unpredicted disease).



Carina Citra Dewi Joe

CARINA SANG PENEMU

Di tengah gencarnya inisiatif produksi vaksinasi global, dua orang ilmuwan Indonesia yang sedang melakukan riset di Jenner Institute, University Oxford, Inggris Indra Rudiansyah dan Carina Citra Dewi Joe hadir bak embun di padang gersang. Bersama ketua team peneliti vaksin Astra Zeneca, Sarah Gilbert, kedua ilmuwan Indonesia ini mengambil peran cukup penting. Indra berperan dalam proses testing vaksin tersebut dan mengadakan evaluasi atas kemajuannya sebelum diproduksi masal. Sedangkan Carina yang memegang satu dari enam paten berperan mendorong produksi vaksin secara masal dan komersial.

Menurut Carina, yang kini masih post doctoral research scientist, proses produksi vaksin Astra termasuk cukup singkat. Biasanya butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk menghasilkan sebuah vaksin, namun semua proses itu bisa diringkas menjadi hanya 1,5 tahun. "Produksi vaksin khususnya vaksin COVID-19 tetap dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja, proses birokrasi dipercepat dan proses pembuatan dilaksanakan secara paralel," ungkapnya. Dulu, katanya setiap proses dilakukan secara bertahap mulai perencanaan, pembiayaan baru trial yang butuh waktu lama. Di saat emergency seperti sekarang ini semua proses dilakukan secara serempak dan bersamaan sehingga bisa



Indra Rudiansyah

diselesaikan dengan cepat. Dengan paten yang dimilikinya, memungkinkan produksi vaksin bisa 10 kali lebih banyak dan bisa mengejar target vaksinasi global dan didistribusikan ke seluruh dunia.

Carina menggunakan 30 mililiter sel atau 2 sendok makan setelah melakukan penelitian selama tiga bulan sehingga hasil produksi bisa 10 kali lipat. Sampai akhir 2021, Astra Zeneca akan mendistribusikan 3 milyar vaksin ke seluruh dunia. Menariknya paten ini bisa dipakai oleh produsen vaksin secara gratis di seluruh dunia. Sejauh ini vaksin Oxford Astra Zeneca sudah disebar ke kurang lebih 170 negara di dunia. Sandy Douglas, ketua Tim Manufactur Oxford mengatakan bahwa formula yang ditemukan Carina bisa sangat produktif membuat biaya produksinya sangat murah, kedua proses produksinya cukup sederhana dan bisa dipelajari dengan cepat oleh pembuat vaksin di seluruh dunia.

Oxford selama ini dikenal punya kemampuan menemukan formula pembuatan vaksin, namun belum ada formula yang bisa memproduksi secara skala besar. Dan penelitian Carina selama 3 bulan seolah menemukan momentum yang tepat. Apa yang dihasilkan Carina bukan kerja semalaman. Dia pernah putus asa, dan hampir menyerah karena merasa beban yang dirasakannya terlalu besar. "Saya pernah bilang ke rekan-rekan, saya mau keluar, saya tidak mau mengerjakan ini lagi.

LAPORAN UTAMA



Sandy Douglas



Prof Fedik Abdul Rantam

“Jadi makanya kita harus mencari dosis yang tepat, aplikasi yang tepat, kemudian kita menyediakan vaksin dengan teknologi yang tepat maka protein itu tetap utuh, tidak rusak. Itu harapan kami sehingga punya kemampuan untuk menetralkan virus-virus yang baru.”

Prof. Fedik Abdul Rantam,
Guru besar Universitas Airlangga

“*I am out, I can not do this anymore.* Sakitpun harus kerja karena tidak ada yang bisa gantikan saat itu,” kenang Carina.

Sandy pun mengamini. “Apa yang terjadi dengan penelitian (vaksin) ini jika Carina terpapar Virus Corona-10. Ini akan jadi bencana besar. Kami butuh Carina, dan tak ada seorangpun yang sudah divaksin waktu itu. Sejournnya saya sangat khawatir waktu itu,” kenang Sandy.

Kerja keras Tim Oxford membuahkan pujian seluruh dunia. Belum lama ini Carina dan kawan-kawan mendapat Pride on Britain Awards 2021 dari Daily Mirror. “Carina telah bekerja sangat keras selama 18 bulan terakhir dalam laboratorium, bekerja sangat keras bahkan dibandingkan peneliti lain sekalipun. Yang membedakan Carina

dari peneliti yang lain adalah dia melakukannya sendiri. Beda dengan peneliti lain yang biasanya terdiri dari banyak orang bahkan sekelas Pfizer,” puji Sandy.

Carina tetap rendah hati. “Saya banyak belajar dari rekan-rekan, atasan dan professor saya. Ini adalah permulaan saja dan masih banyak yang harus saya pelajari untuk jadi orang hebat,” kata Carina.

Sementara Indra yang sedang mengikuti program doctor di *clinical medicine* di universitas yang sama lebih banyak berkutat di laboratorium. Keterlibatannya dalam proyek vaksin ini bisa dibilang di luar dugaan, karena akibat situasi emergency maka dibutuhkan banyak tenaga yang terlibat di proyek ini, maka Indrapun diajak untuk bergabung di tim penelitian. “Saya akhirnya mendapat tugas untuk membantu monitoring *antibody response* di antara para volunteer dalam uji klinis. Jadi memang orang yang terlibat itu sangat banyak bisa ratusan dan di berbagai tempat di UK, tidak hanya di Oxford,” ujar Indra. Kedua peneliti ini sepakat bahwa vaksin adalah cara terbaik untuk mencegah infeksi selain mereka yang telah dinyatakan sembuh, karena immune systemnya dengan sendirinya terbentuk.

Dari tanah air, peneliti vaksin merah putih berpacu dengan waktu. Menurut rencana vaksin ini akan diproduksi secara massal tahun depan dan bisa digunakan secara luas. Beberapa ilmuwan dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu bergabung di bawah kendali Prof Fedik Abdul Rantam. Guru besar kedokteran hewan Universitas Airlangga Surabaya ini perkiraan bulan Maret 2022 akan masuk fase pengembangan industri. Fedik adalah guru besar virology yang telah meneliti mengenai virus kurang lebih selama 40 tahun.

Vaksin yang melibatkan banyak kerja sama antara lembaga ini diprakarsai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Setidaknya ada 6 lembaga yang ikut serta dalam kerja sama ini seperti Lembaga Bio Molekular Eijkman, Bogor Universitas Airlangga Surabaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta beberapa lembaga lainnya.

Secara teknis, vaksin ini akan dibuat dengan menggunakan *platform inactivated virus* (virus yang sudah dimatikan) serta protein rekombinan. Dibanding dengan negara lain, seperti Vietnam, Indonesia termasuk terlambat dan harus memulai semuanya dari awal. Karena itu beberapa persyaratan harus dipenuhi antara lain *good manufacturing practices* (GMP) serta laboratorium dengan tingkat keamanan paling tinggi (Bio Safety) level 3 (BSL-3). “Sebelum

itu kita biasanya industri kita enggak dari nol. Sekarang kita perlu mengembangkan dari nol, dan perlu memenuhi kebutuhan dengan standar yang ada," ujar deputy penguatan inovasi BRIN Erry Ricardo.

Saat ini, vaksin merah putih akan memasuki fase uji klinis tahap 3 yang akan diadakan pada bulan Desember 2021 hingga awal tahun 2022. Vaksin ini dikembangkan dari *isolate virus* yang pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Maret 2020 sampai pada varian terbaru Delta dengan segala sub varian yang ditemukan di beberapa daerah.

Direktur LBM Bogor Amin Soebandrio mengatakan bahwa vaksin ini diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya varian baru yang bisa muncul di masa mendatang. Karena itu penelitian terus dilakukan serta beberapa penyesuaian kecil yang dipakai jika kemungkinan ada virus lagi di masa depan, sehingga antibodi yang terbentuk bisa mengenal virus tersebut. Bahkan misalnya efikasinya hanya tinggal 50%, menurut WHO vaksin tersebut masih layak digunakan.

Jika pun nanti ada penyesuaian, kata Amin, maka tidak perlu dari awal lagi prosesnya. Berbeda dengan Indonesia, China misalnya sudah sangat berpengalaman menghadapi wabah SARS dan MERS yang pernah melanda negara tersebut, dan mereka sudah punya mekanisme untuk mengatasi wabah ini, termasuk membikin vaksin

untuk mencegahnya.

Sementara itu Prof. Fedik Abdul Rantam yakin bahwa vaksin yang dikembangkan Unair ini akan masih efektif terhadap varian baru karena dalam materi genetik virus terdapat bagian-bagian yang tidak mudah berubah alias *conserved*.

Ditambahkannya, platform inactivated virus yang digunakan tim peneliti dari Universitas Airlangga, dapat menghasilkan vaksin yang "cukup komprehensif" karena memiliki empat jenis protein imunogenik, yang dapat menginduksi antibodi, untuk menetralkan virus.

Untuk membuktikannya, para peneliti melakukan "uji tantang" dengan memaparkan vaksin pada serum dari orang-orang yang terinfeksi varian delta, juga menyuntikkannya pada hewan uji yang kemudian diinfeksi dengan varian-varian baru. "Dan nampaknya tidak ada yang positif [Covid-19], artinya berarti dinetralisir," klaim Prof. Fedik.

Bagaimanapun, imbuhnya, keefektifan suatu vaksin sangat dipengaruhi oleh dosis dan waktu penyuntikannya. Formulasi itulah yang sedang dicari dengan uji praklinis.

"Jadi makanya kita harus mencari dosis yang tepat, aplikasi yang tepat, kemudian kita menyediakan vaksin dengan teknologi yang tepat maka protein itu tetap utuh, tidak rusak. Itu harapan kami sehingga punya kemampuan untuk menetralkan virus-virus yang baru," kata Prof. Fedik.

Salah satu tahap yang cukup menantang



LAPORAN UTAMA



menurut Fedik adalah tahap uji klinis, karena harus melibatkan beberapa sample yang cukup besar. Untuk itu Fedik akan mengambil sample dari Jawa dan Bali karena kepadatan penduduknya. Selain itu Fedik sendiri tidak kesulitan mengambil mahasiswa di Universitas Airlangga sebagai calon uji sample.

Vaksin ini rencananya akan diproduksi oleh PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Perusahaan patungan Indonesia dan investor China ini akan terlibat dalam proses produksi komersial yang akan diperkirakan dilakukan pada bulan April 2022. Perusahaan ini berpengalaman dalam memproduksi vaksin flu burung yang melanda China dan Hongkong serta negara timur tengah beberapa waktu lalu.

Perusahaan ini telah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (LPOM). Menurut Ketua BPOM, Penny Lukito perusahaan ini tampaknya yang paling siap yang akan membentuk konsorsium Unari-Biotis. "BPOM akan mendukung, mengawal, fasilitasi agar sesuai dengan standar intl agar keamanan dan kualitas terpenuhi," kata Penny.

Beberapa pihak mengapresiasi inisiatif Indonesia membangun pabrik vaksinnya sendiri, karena sudah siap mengantisipasi situasi dan kemungkinan adanya wabah lain di masa depan.

Setidaknya dengan pengalaman tersebut punya bekal yang baik dalam mencegah meluasnya berbagai virus yang mematikan di masa depan. Sambil menunggu munculnya vaksin Merah Putih, banyak pihak dan para ahli sepakat, termasuk Pandu Rino dari Universitas Indoensia sepakat bahwa semua vaksin yang tersedia di pasar saat ini sudah lebih dari cukup memadai untuk menghentikan laju penularan virus ini. Terbukti misalnya angka penularan makin hari makin menurun.

Indonesia yang kini masuk dalam peringkat 5 dunia sebagai negara dengan tingkat vaksin tertinggi, mendapat apresiasi dari dunia karena, bisa mengejar vaksinasi dengan berbagai kondisi yang dialami Indonesia dewasa ini. Pandu juga yakin bahwa kendati usia vaksin dalam tubuh akan kadaluarsa misalnya dalam 6 bulan, namun dengan terbentuknya antibody tubuh, akan mampu mengenal dengan baik virus yang akan masuk ke dalam tubuh. "So cara terbaik mencegah penularan adalah dengan vaksin, dan hasilnya sudah kelihatan," kata Pandu.

Selain itu, ada beberapa terapi yang sudah dikembangkan misalnya terapi konvalesen. Terapi plasma konvalesen merupakan salah satu metode pengobatan yang kini digunakan untuk menangani pasien COVID-19, khususnya dengan gejala berat. Pengobatan ini diketahui dapat meningkatkan

peluang kesembuhan pasien COVID-19.

Terapi plasma konvalesen adalah pemberian plasma darah donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh dari Covid-19 (penyintas COVID-19) kepada pasien Covid-19. Tujuan utama terapi ini adalah mempercepat penyembuhan dan pemulihan, meringankan gejala yang dialami, seperti sesak napas, nyeri dada, atau demam, mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit dan menurunkan risiko kematian. Terapi yang sebenarnya sudah lama digunakan dunia kedokteran ini dipromosikan kembali oleh ahli genetika dan biomolekular Universitas Kristen Maranatha Dr. dr. Theresia Monica Rahardjo, Sp.An, KIC., M.Si. Monica, yang diawal pandemi gencar mempromosikan terapi ini sempat mendapat perlawanan dari berbagai kalangan termasuk dari sesama koleganya. Namun karena efektivitasnya terbukti baik, makan penggunaannya pun semakin luas oleh berbagai rumah sakit.

Dan yang tak kalah populernya adalah team “vaksin” nusantara besutan Dr Terawan, mantan menteri kesehatan Republik Indonesia bersama anggota dari RS TNI Angkatan Darat. Secara medis, vaksin ini menggunakan sel dendritic dari dalam tubuh pasien sendir, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Beberapa orang Indonesia secara symbol telah memakai terapi ini dan merasakan manfaatnya. Kendati masih ada kontroversi mengenai vaksin ini tim peneliti terus berpacu dengan waktu dan diharapkan jadi alternatif lain bagi pasien untuk membangun kekebalan tubuhnya.

POOL TEST TEKAN BIAYA

Laboratorium Biomolekular Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara Timur (Lab Biokesmas NTT) yang dirancang Forum Academia NTT, berhasil membuat surveilans sekolah untuk mendorong percepatan testing dan tracing pada masyarakat dengan biaya yang murah dengan target utama pengendalian virus di sekolah. Model yang mereka gunakan telah berhasil melalui uji coba di 8 SMA/ SMK di Kota Kupang selama 3 bulan.

Hal utama yang mereka lakukan adalah edukasi, testing dan pendampingan pada murid, guru dan staf lainnya dengan menggunakan pool test PCR secara berkala tanpa biaya. Selain mempercepat surveilans atas tingkat infeksi, pool test juga bisa menekan biaya hingga 8 kali. Hasilnya semua sekolah disurvei nol kasus Covid-19. Cara ini telah mengundang apresiasi dari kementerian kesehatan dan akan diterapkan di tempat lain di seluruh Indonesia.



“Kuncinya adalah partisipasi sekolah, kapan mereka akan sekolah tatap muka dan tetap mematuhi protocol kesehatan,” kata kepala Lab Biokesmas NTT, Dr Fima Inabuy. Cara kerja laboratorium ini telah menjadi rujukan nasional dalam mengendalikan pandemi yang pada ujungnya akan mendorong kebangkitan ekonomi. “Ya, kami senang karena apa yang dilakukan tidak sia-sia bahkan menjadi rujukan di Indonesia,” kata Angela Poe, salah seorang ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini.

Menurut Fima, Lab Biokesmas NTT juga memberikan tes massal untuk mencegah timbulnya cluster keluarga, melakukan screening terhadap Pekerja Migran Indonesia, memberikan test PCR kepada para mahasiswa dan pencari kerja yang ingin melakukan perjalanan atau PKL (Praktek Kerja Lapangan), dan melakukan surveilans tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit secara rutin.

Sayang inisiatif dari ilmuwan NTT ini seperti ditelah bumi. Lemahnya dukungan pemerintah daerah NTT, seperti menjadi badai yang memupus semangat ilmuwan lokal ini untuk berpartisipasi dalam mengatasi pandemi di Indonesia.

Berbagai pihak mengapresiasi pioniritas putra-putri Indonesia ini dalam dunia kedokteran dan science yang bisa membantu umat manusia. Kuncinya adalah adanya desain kebijakan yang comprehensive serta adanya leadership politik yang efektif agar bisa terlaksana dengan baik.

Industri Farmasi : Saatnya Mandiri

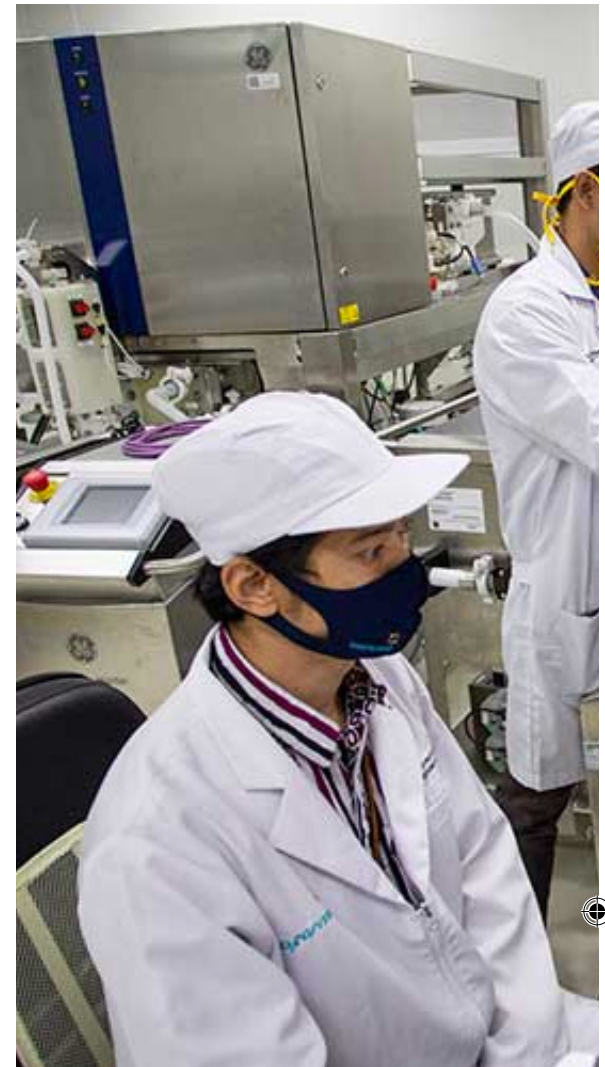
Virus Covid-19, yang melanda Indonesia – dan juga dunia—selama hampir 2 tahun belakangan ini telah mengubah banyak hal; cara bekerja, berpikir, strategy pembangunan setiap negara, rencana dan model bisnis, transaksi ekonomi serta perilaku baru umat manusia. Umat manusia sepakat untuk menata ulang semua itu, karena memang tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri.

Perubahan sosial, ekonomi yang tadinya sangat sequential, artinya berurutan secara teratur, tiba-tiba berubah sangat drastis dan tidak terduga (uncertain) karena bergabungnya beberapa faktor eksternal dan internal sebuah negara, yang tentu mempengaruhi ekonomi sebuah bangsa. Karena itu perlu adaptasi perubahan yang terjadi di luar.

Harus diakui negara kita sangat lamban dalam banyak hal mengantisipasi perubahan yang begitu cepat dan tidak menentu ini. Karena itu ketika krisis datang dan tiba-tiba, kita semua gelagapan dan mengambil tindakan yang sangat ad hoc, seperti ketika kita menghadapi wabah covid-19 ini.

Kita baru sadar misalnya industri penunjang sektor kesehatan, seperti alat-alat kesehatan, mulai dari yang sederhana seperti masker ternyata belum memadai. Memang ada produsen masker lokal yang sudah berpengalaman, namun wabah yang masif ini membuat kita kewalahan dan tidak seandainya mengubah statusnya dari eksportir menjadi pemain lokal, karena ada aturan main yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi situasi darurat, kita terpaksa mengimpor sebagiannya menunggu sampai pemain lokal menaikkan kapasitas produksinya.

Belum kalau kita bicara sampai ke level yang lebih tinggi misalnya produksi reagen, sebagai salah satu zat kimia penting untuk mengetes tingkat infeksi seseorang, melalui test polymerase chain reaction (PCR). Ini tidak termasuk mengenai pembangunan dan ketersediaan laboratorium yang bisa menjangkau wilayah Indonesia yang.



Setingkat lebih tinggi di atasnya adalah bagaimana membangun industri farmasi yang sifatnya preventif, di mana vaksin termasuk di dalamnya. Memang kita sudah punya pabrik vaksin milik BUMN yakni Bio Farma yang telah berpengalaman membikin vaksin seperti polio dan lain sebagainya dan sudah diekspor ke seluruh dunia. Namun karena penyakit ini termasuk baru dan serangannya sangat tiba-tiba, pabrikan perlu menyesuaikan diri.

KAPAN MANDIRI?

Namun, tantangan menuju kemandirian industri farmasi nasional adalah lebih dari 90% bahan bakunya nasional masih harus didatangkan dari negara lain seperti China dan India. Dengan mengimpor bahan bak, tentu berdampak pada harga, akhir yang harus ditanggung konsumen menjadi agak mahal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Antara lain Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya



kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Namun, penyakit lama yakni lemahnya koordinasi dan kompleksitas masalah bangsa membuat Keputusan Presiden ini masih jalan di tempat.

Pada level kementerian, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi. Dengan penerapan TKDN ini, industri farmasi akan terpacu untuk membangun industri bahan baku obat (active Pharmaceuticals Ingredients) di dalam negeri.

Menurut catatan Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) saat ini jumlah industri farmasi ada sekitar 214-224 perusahaan terdiri dari 4 BUMN, 24 multinasional, dan 186 perusahaan swasta nasional.

Seperti industri di Indonesia lainnya, pabrik obat lokal, hanya bertindak seperti tukang masak. Bahan bakunya harus belanja di berbagai negara. Dengan demikian kebutuhan impor bahan baku pembuatan obat menjadi sangat besar. Impor bahan baku ini, di masa normal tentu saja sangat mengganggu cadangan devisa nasional. Dan di saat darurat seperti saat ini, kondisi negara produsen bahan baku sangat mempengaruhi mesin produksi obat-obatan lokal. Untung saja lock down di China dan India tidak berlangsung lama. Namun momentum ini menjadi *trigger* untuk bangsa kita bisa mandiri dalam industri farmasi.

Solusi jangka pendek oleh kalangan industri tentu saja melakan diversifikasi negara importir. Artinya jika selama ini selalu tergantung pada China dan India, sudah saatnya berpaling kepada negara lain. Namun tentu saja bukan pekerjaan mudah karena tidak banyak negara yang mampu memproduksi dalam skala besar. Apalagi negara tersebut lebih mengutamakan kepentingan domestik dari pada kepentingan negara lain.

Tantangan lain dari kalangan internal produsen farmasi adalah, selama ini mereka mungkin hanya memproduksi *single product drugs*. Tidak semua industri farmasi nasional memiliki portofolio produk yang beragam.

Sudah menjadi pengetahuan umum beberapa produsen obat lokal hanya fokus pada produk tertentu saja. Misalnya hanya memproduksi obat-obatan untuk sakit kronis, seperti diabetes, jantung atau ginjal. Sehingga ketika wabah melanda negeri, Indonesia kekurangan pasokan karena, pemain farmasi tidak terbiasa atau tidak punya kapasitas untuk memproduksi produk yang beragam yang lain. Yang survive atau bertahan adalah pabrikan yang terbiasa membikin aneka produk yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dalam keadaan darurat.

Harus diakui beberapa produsen farmasi panen berlimpah di saat krisis kesehatan melanda dunia dan Indonesia. Beberapa produk yang tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan Covid-19 tidak ikut merasakan *booming* dari sisi permintaan dan tentu saja keuntungan finansial.

Misalnya produk-produk kategori promotif, preventif, dan kuratif mampu bertahan dan terus tumbuh. Produk promotif seperti multivitamin sampai harus menambah jam kerja mereka dan sempat mengalami lonjakan harga yang kurang masuk akal. Sementara produk kuratif sesuai regimen terapi Covid-19 secara nasional, juga mengalami pertumbuhan yang berarti kendati di banyak kasus obat-obatan tersebut belum ada yang secara khusus diresepkan untuk mengobati

LAPORAN UTAMA



Covid-19 dan harus diberikan dalam situasi darurat.

Namun sepertinya hujan “tidak merata”. Beberapa produsen obat kronis seperti untuk penyakit gigi misalnya mengalami pelambatan yang signifikan, karena pasien enggan ke rumah sakit. Banyak klinik kesehatan gigi, kesehatan jantung dan penyakit kronis lainnya terpaksa harus liburan menunggu situasi kembali normal. Produk seperti “Antimo” yang identik dengan sektor pariwisata yang doyan travelling misalnya mengalami sedikit mati suri karena sangat sedikit orang yang bepergian.

Dan yang kini menjadi pekerjaan baru adalah memproduksi obat-obatan yang sifatnya preventif misalnya vaksin. Sejak pertengahan tahun ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN juga telah melakukan uji coba Fase 3 calon vaksin Covid-19 melalui PT Biofarma (Persero) seperti Vaksin Merah Putih.

Menurut kabar terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memberikan persetujuan tahap ke III, untuk vaksin yang digagas oleh ilmuwan dari Universitas Airlangga

Surabaya ini. Kalau tidak meleset awal 2022 produksi komersial dan masal akan segera dilakukan.

Namun kalangan industri ini berkeyakinan, pandemi Covid-19 merupakan satu berkah tersembunyi karena menjadi salah satu pendorong terjadinya revolusi industri farmasi nasional. Karena itu mereka sangat berharap adanya dukungan semua pihak untuk bisa memajukan industri farmasi dalam negeri demi mencapai ketahanan nasional.

RISET DAN PENTA HELIX

Pemerintah menyadari pentingnya kemandirian industri farmasi dalam negeri dan berupaya mendorong kemandirian tersebut untuk menekan harga obat dan mengurangi ketergantungan bahan baku obat impor. Pemerintah juga mencatat bahwa beberapa pemain industri farmasi nasional sudah mulai masuk ke bahan baku, namun jumlahnya sangat terbatas. Menurut catatan kementerian Kesehatan, hanya 10% dari produsen farmasi lokal bergerak di bahan dasar obat-obatan. Selebihnya “cari gampang” dengan

mengimpor dari luar negeri.

Kendati situasi makin sulit, para pemain di industri ini tetap yakin. Dorajatun Sanusi, salah satu pengurus di GP Farmasi memberikan sinyal positif akan potensi industri ini ke depan. Selain potensi pasar dalam negeri yang masih sangat besar, juga pasar luar negeri termasuk pasar-pasar negara Timur Tengah dan Afrika, adalah pasar potensial yang layak dikembangkan. Menurut perkiraan GP Farmasi, diprediksi pangsa pasar farmasi dalam negeri mencapai Rp450 triliun pada tahun 2025. Dorajatun menyarankan bagi para pemain farmasi untuk berpikir mendiversifikasi ke produk hulu (bahan baku) sambil terus mempertahankan kerja sama yang baik dengan produsen luar negeri, selain menjamin pasokan juga mempertahankan pasar yang sudah ada maupun dalam rangka perluasan pasar di masa mendatang.

Untuk mengembangkan industri bahan baku obat, memang bukan pekerjaan yang mudah. Setidaknya harus dilakukan prastudi kelayakan, riset yang mendalam, kecukupan dana, dan memanfaatkan kemampuan BUMN atau konsorsium dengan swasta. Dengan riset yang handal, kita bisa memastikan ketersediaan bahan baku utama, dana, serta kesiapan tenaga-tenaga yang handal serta dukungan regulasi pemerintahan yang kuat untuk menopang keberlangsungan industri ini.

Guru besar Farmakology ITB, Prof Dr I Ketut Adnyana mengatakan, kalau bicara industri farmasi, misalnya di hulu ada keterlibatan peneliti/akademisi yang berperan sebagai penemu

formula obat-obatan. Selebihnya tentu saja bagaimana peran pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang memadai dan mendukung pengembangan industri tersebut. Selain tentu menyediakan anggaran misalnya membangun laboratorium, peningkatan kapasitas penelitian dan riset di perguruan tinggi.

Menurut Ketut ada lima kekuatan penting yang selain menunjang dalam mendukung berhasilnya system kesehatan nasional (penta helix) di sektor ini seperti industri farmasi, pemerintah, peneliti/akademisi, masyarakat dan media dan kelima-limanya belum bekerja optimal. Kalau bicara industri farmasi misalnya, di hulu ada peran para ilmuwan termasuk para dokter, ahli mikrobiologi, kemudian di lapisan kedua berkenaan dengan investasi artinya keterlibatan pemodal, system pembiayaan, kemudian yang penting adalah regulasi, karena ketatnya peraturan dalam industri ini maka peran regulator sangat sentral dalam mempercepat implementasi program termasuk menjaga keamanan pasien sebagai target utama dari industri obat-obatan.

“Salah satu industri yang sangat *highly regulated* adalah industri farmasi, karena itu pemerintah harus bekerja keras mengerjakan bagiannya,” kata Ketut seraya menambahkan bahwa kerja sama dan koordinasi antara bagian ini hanya terlihat indah dalam wacana namun masih compang camping dalam pelaksanaannya. Satu hal lagi, industri farmasi itu 100% sangat ilmiah maka dari itu peran kaum intelektual dalam hal ini kampus atau lembaga penelitian menjadi sangat penting dan strategis.





Hidup Harmonis Dengan Wabah

Di tengah rapuhnya system kesehatan nasional, setiap individu harus bisa membangun system kekebalan tubuhnya masing-masing dengan menerapkan pola hidup sehat. Hidup berdampingan, harmonis dengan wabah akan membuat Indonesia tetap merajut harapan akan masa depan yang lebih baik.

Banyak pelajaran penting yang kita dapatkan dari penderitaan umat manusia karena wabah Covid-19 yang hingga tulisan ini diturunkan masih berstatus pandemic. Sebentar lagi statusnya mau tak mau harus menjadi endemic, artinya wabah penyakit yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali seperti halnya kita mengalami wabah flu atau influenza. Namun bedanya umat manusia di seluruh dunia sudah lebih siap dari sisi system kesehatan nasional maupun komunitas.

Seperti halnya kita telah “akrab” hidup dengan virus flu, Hepatitis-B, Malaria, demam berdarah yang selalu muncul pasca musim hujan misalnya, maka ke depan umat manusia pun harus mampu hidup berdampingan dengan mikroba Covid-19.

Secara natural, makhluk (virus) berukuran nano ini hanya bisa hidup di dalam tubuh, di mana wilayah hidung, tenggorokan hingga paru-paru menjadi inangnya (reseptornya) maka sebelum masuk ke dalam tubuh sudah bisa dilumpuhkan misalnya dengan imun tubuh manusia yang kebal.

“Jadi salah satu yang bisa dilakukan untuk membuat makhluk ini tidak aktif, adalah dengan penyemprotan atau rajin membersihkan tubuh kita dengan sabun, sehingga bisa menjadi pagar alami untuk menghalang musuh ini masuk ke dalam tubuh,” kata guru besar Farmakology ITB, Prof I Ketut Adnyana M.Si PhD belum lama ini secara virtual dengan Majalah ‘buka’. Dan yang paling penting demi mencegah masuk ke dalam tubuh, serta mutasi ke induk semang baru seperti di hewan, maka kita harus mempekuat imun tubuh kita.

HARMONI DENGAN COVID-19

Hingga pada titik tertentu, demi mencegah menyebarluasnya penyakit ini, dan juga penyakit lainnya, maka hidup dengan prinsip “Harmoni Covid-19” menjadi sangat penting. Hal yang terpenting dari prinsip harmoni adalah kita sudah bisa mengatasi wabah ini ketika sewaktu-waktu muncul dan penanganannya sama seperti yang dilakukan ketika mengalami penyakit tersebut. Wabah malaria misalnya masih menghantui sebagian wilayah Papua, namun kita sudah siap ketika ada orang yang terkena demam tersebut. Atau wabah demam berdarah (dengue) yang menjadi langganan beberapa daerah—terutama di Jawa Barat-- sudah bisa diantisipasi demi mencegah penularannya dan obat-obat untuk pencegahan dan penyembuhannya sudah cukup memadai di seluruh tanah air.

Prinsip harmoni yang lain dan tak kalah pentingnya, menurut Ketut adalah sikap bijak dalam mengkonsumsi makanan. Kita harus mengenal dan mempelajari tujuan kita mengkonsumsi makanan tertentu juga termasuk perlu tidaknya menambah asupan vitamin. Diakui banyak dari kita yang asal mengkonsumsi makanan tanpa kita mengevaluasi tubuh kita sendiri, sehingga pada beberapa kasus malah menyebabkan bencana seperti terjadinya badai sitokin yang dialami beberapa orang yang justru menyebabkan kematian. “Dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri, dan kita harus bisa membangun harmoni dalam diri kita. Sehat itu artinya ada harmoni dalam tubuh,” kata professor Ketut.

Selain itu, kondisi kejiwaan yang stabil sangat membantu dalam membangun kesehatan seseorang (mind body medicine). Termasuk di dalamnya pola pikir, kata Ketut mempengaruhi tubuh manusia, baik secara anatomi, psikologis, maupun fisiologis yang akan bersama-sama mengantarkan manusia pada kondisi tubuh yang sehat. Tambahan pula, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, menghindari asupan

“Persoalan klasik kita adalah ego sektoral serta lemahnya koordinasi. Kebijakan di industri hulu, seperti petrochemical yang menjadi produsen bahan baku sintetis obat-obatan masih belum ada titik cerah kapan akan segera terwujud. Kita berharap semua pihak terutama pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan industri hulu, karena perannya sangat strategis termasuk untuk memajukan industri farmasi.”

Farmakology ITB, Prof I Ketut Adnyana M.Si PhD,
Guru Besar Farmakology ITB

berlebihan, seperti konsumsi snack berlebihan, pemanis buatan, pengawet justru sangat merusak system pertahanan tubuh manusia. Ditambah dengan olah raga teratur seperti jalan kaki selama kurang lebih 40 menit per hari atau gerak fisik lainnya akan menambah system kekebalan tubuh manusia.

CARUT MARUT

Ketut mengakui carut marut system kesehatan nasional menjadi salah satu sebab tidak efektifnya negara mengatasi wabah ini. Situasi dan kondisi ini tentu menjadi otonom kritik dan juga menjadi bahan penting untuk mengevaluasi system kesehatan nasional mulai dari rumah sakit, industri farmasi, tenaga kesehatan, kesiapan regulasi maupun koordinasi pemerintah dari pusat sampai ke level terendah. Industri farmasi nasional misalnya menyimpan persoalan lama yang belum berhasil diatasi, di mana 90 % bahan bakunya masih tergantung import. Ketut mengatakan, kesiapan industri farmasi tergantung pada industri lainnya seperti kesiapan industri hulu di bidang petrochemical yang menjadi bahan baku sintetis penting untuk industri obat serta sektor lainnya.

Walau demikian Ketut mengakui, secara parsial



“Salah satu industry yang sangat highly regulated adalah industri farmasi, karena itu pemerintah harus bekerja keras mengerjakan bagiannya, yaitu regulasi yang familiar, dan punya visi yang jelas.”

Indonesia sebenarnya punya beberapa keunggulan, seperti tersedianya ahli di bidang farmakology, sumber daya alam sebagai salah satu sumber bahan baku obat, dan bahkan di bidang industri vaksin, Indonesia punya sejarah sukses yang baik seperti yang dilakukan oleh produsen vaksin seperti Biofarma yang telah sukses memproduksi berbagai vaksin dan bahkan sudah diekspor ke puluhan negara. Saat ini, milsanya badan usaha milik negara (BUMN) tersebut terlibat dalam pembuatan vaksin merah putih yang akan diproduksi secara komersil tahun 2022.

“Persoalan klasik kita adalah ego sektoral serta lemahnya koordinasi. Kebijakan di industri hulu, seperti petrochemical yang menjadi produsen bahan baku sintetis obat-obatan masih belum ada titik cerah kapan akan segera terwujud. Kita berharap semua pihak terutama pemerintah agar segera merealisasi industri hulu, karena perannya sangat strategis termasuk untuk memajukan industri farmasi,” kata Ketut.

Selanjutnya Ketut mengatakan, kalau bicara industri farmasi, misalnya di hulu ada keterlibatan peneliti/akademisi yang berperan sebagai penemu formula obat-obatan. Selebihnya tentu saja bagaimana peran pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang memadai dan mendukung pengembangan industri tersebut. Selain tentu menyediakan anggaran untuk membangun laboratorium yang moderen, peningkatan kapasitas penelitian dan riset di perguruan tinggi.

Menurut Ketut ada lima kekuatan penting yang selain menunjang dalam mendukung berhasilnya system kesehatan nasional (*penta helix*) di sektor ini seperti industri farmasi, pemerintah, peneliti/ akademisi, masyarakat dan media dan kelima- limanya belum bekerja optimal. Kalau bicara industri farmasi misalnya, di hulu ada peran para ilmuwan termasuk para dokter, ahli mikrobiologi, kemudian di lapisan kedua berkenaan dengan investasi artinya keterlibatan pemodal, system pembiayaan, kemudian yang penting adalah regulasi, karena ketatnya peraturan dalam industri ini maka peran regulator sangat sentral dalam mempercepat implementasi program termasuk menjaga keamanan pasien sebagai target utama dari industri obat-obatan.

“Salah satu industri yang sangat highly regulated adalah industri farmasi, karena itu pemerintah harus bekerja keras mengerjakan bagiannya, yaitu regulasi yang familiar, dan punya visi yang jelas” kata Ketut seraya menambahkan bahwa kerja sama dan koordinasi antara bagian ini hanya terlihat indah dalam wacana namun masih compang camping dalam pelaksanaannya. Satu hal lagi, industri farmasi itu 100% sangat ilmiah maka dari itu peran kaum intelektual dalam hal ini kampus atau lembaga penelitian menjadi sangat penting dan strategis.

Ketut yakin pada kemampuan tubuh manusia sendiri bisa mengatasi penyakit ini. Tingkat kesehatan pada level individual harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, terutama yang terkait dengan gaya hidup kita, pola konsumsi, aktivitas fisik, pola pikir kita dan lain sebagainya. Setelah apapun kekuatan sebuah penyakit, kalau tubuh kita sedang tidak fit, tidak sehat pasti dengan mudah dia menyebabkan penyakit.

“Maka balik lagi pusatnya adalah tubuh kita sendiri. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu adalah melalui tiga tahap,” kata alumni Toyama University ini. Yang pertama mencegah kita terpapar virus misalnya dengan pembatasan kegiatan mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Kedua mencegah terjadinya internalisasi yaitu masuknya komponen virus tersebut ke dalam sel tubuh kita, sehingga dia tidak dapat berkembang biak. Untuk itu, anjuran selalu bersih melalui 5-M atau vaksinasi adalah bagian dari kegiatan mencegah virus masuk ke dalam tubuh.

Ketiga mencegah terjadinya krisis bahkan kematian karena itu dipersiapkan ventilator oxygen untuk membantu pernapasan hingga obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengobati penyakitnya.

Secara spiritual, menurut Ketut, apapun keyakinan kita, segala sesuatu ada sisi positif dan negatifnya. Apapun agama yang kita yakini mestinya bisa digunakan dengan bijak untuk mengontrol yang baik dan buruk. Karena itu para pemimpin dan tokoh agama sebaiknya dilibatkan dalam kampanye demi mencegah meluasnya wabah ini. Tubuh kita harus dilatih untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh, karena itu, kata guru besar yang telah mengumpulkan puluhan karya ilmiah di berbagai jurnal nasional dan internasional, harus terus dipertahankan agar kondisinya terus prima. Sambil mengapresiasi pada pemerintah pusat yang telah bekerja sangat keras, dan hampir sudah pada on the right track, guru besar farmakologi ini melihat pada implementasi di lapangan sering mengalami problem dan terbuka terhadap perbaikan kebijakan.

“Dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri, dan kita harus bisa membangun harmoni dalam diri kita. Sehat itu artinya ada harmoni dalam tubuh.”



Menuju Endemik

Epidemiolog Universitas Indonesia, Dr Pandu Riono sangat optimistis bahwa Indonesia akan berhasil keluar dari cengkraman wabah Covid-19 setidaknya di paruh kedua tahun 2022, asalkan bisa mengejar angka vaksin serta menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Kunci sukses menurunkan infeksi wabah ini, salah satunya karena kepemimpinan yang efektif yang telah diperlihatkan pemerintah.



Dr Pandu Riono adalah sedikit dari epidemiolog, atau ahli mengenai penyakit menular dari department Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang berbicara agak lantang dan mendapat panggung popularitas selama wabah Covid-19 menyerang Indonesia dan seluruh dunia.

Karena berbagai serangan dan kritik ke pemerintah, banyak yang menuduhnya punya ambisi politik untuk menjadi Menteri Kesehatan. Peraih Doktor dari University of Pittsburgh Amerika Serikat ini tak ragu-ragu mengemukakan saran-saran konstruktif bagi perbaikan penanganan wabah menular di Indonesia.

Pandu, menurut data dari Universitas Indonesia adalah spesialis pemodelan matematika HIV/ AIDS, TB, IMS, Hepatitis B/C dan Jaringan Risiko Seksual untuk HIV dan IMS, serta Jaringan Risiko lain untuk Penyakit Menular yang Muncul. Minat ilmunya

dalam Statistik Bayesian dan berurusan dengan masalah epidemiologi.

Ketika wabah ini sudah menjadi perhatian di China, dia mengeritik pemerintah karena lamban merespons situasi, bahkan terkesan meremehkan penyakit ini. Ketika wabah benar-benar melanda, sejak Maret 2020 Pandu sering dimintai tanggapannya mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Dia ingin agar pemerintah waktu itu segera mencegah penularan penyakit dengan melakukan pembatasan sosial. “Virus ini hanya ditularkan dari manusia ke manusia, karena itu manusia harus berhenti bergerak, bertemu dengan orang untuk waktu tertentu,”kata Pandu.

Karena sering kritik pemerintah, Pandu menjadi bulan-bulanan netizen, bahkan terkena *doxing* (membongkar data-data yang sifatnya privat) oleh pendukung pemerintah. Namun dia tetap bergeming. Dia mempertaruhkan ilmunya untuk kebaikan bangsa. Karena sering mengeritik pula



akhirnya pemerintah melunak dan mengajaknya untuk berdiskusi mengenai kebijakan yang diambil pemerintah.

Hampir setiap bulan ada saja yang dikritiknya. Misalnya kritik karena proses dan laporan uji klinis kombinasi, obat tim peneliti Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan BIN dan TNI Angkatan Darat dilihatnya kurang memenuhi prosedur yang baku. Karena kritiknya pula, entah berefek atau tidak banyak masukannya dipertimbangkan pemerintah dan diam-diam mengikuti sarannya.

Bicaranya blak-blakan, tanpa basa basi. Ketika varian delta menggila di awal Juli dia berteriak untuk menghentikan semua kegiatan berkumpul di luar rumah. Ketika pemerintah kerap membanggakan angka kesembuhan yang membaik, Pandu justru mengajak orang berpikir masih tingginya angka kematian. Karena menurut dia pasien Covid-19 yang tidak punya penyakit lain (comorbid) akan dengan sendirinya sembuh

setelah periode tertentu. Yang perlu diperhatikan, katanya, adalah angka kematian tersebut membuat Indonesia masuk kategori sebagai negara dengan angka infeksi tinggi.

Ketika Indonesia menjadi salah satu episentrum penularan varian Delta, pada bulan Juli sampai Agustus 2021, dia minta supaya negara tetangga membantu Indonesia dalam menanggapi krisis kesehatan pandemik ini dengan berbagai cara. Selain secara politis sebagai bentuk solidaritas sesama negara Asia, juga bisa membantu menekan laju penularan.

MENUJU ENDEMIK

Pandu sepakat bahwa cepat atau lambat, Covid-19 akan menjadi *endemic*, artinya *treatment* terhadap wabah ini seperti penyakit menular lainnya seperti flu, demam berdarah dan malaria. Negara tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang sangat emergency apalagi disertai anggaran yang emergency nan jumbo, karena sudah masuk dalam biaya rutin kesehatan per tahun.

Namun menurut Pandu, ada syarat agar diturunkan statusnya menjadi dari pandemic ke endemic. "Harus bisa menekan tingkat infeksi alias penularan sampai level yang rendah (low infection) sesuai standar World Health Organization (WHO) setidaknya di bawah 5%, serta tingkat kematian (low death rate) yang rendah," kata Pandu sambil menambahkan biaya yang dianggarkan negara juga rendah menjadi salah satu indikator bahwa kita masuk ke fase endemic.

Tanda-tanda menuju situasi endemis kelihatannya sudah mulai tampak. Selama kurang lebih 1 bulan dari Oktober sampai awal November angka penularan dan kematian terus rendah. Bahkan tanggal 7 November, angka kematian termasuk paling rendah selama tahun 2021 sebesar 11 orang pasien.

Dari evaluasi pertemuan besar seperti PON XX Papua membuktikan Indonesia bisa menyelenggarakan event besar dengan protocol ketat, karena kontingen yang terpapar virus sangat rendah. Selama ini juga terlihat mobilitas warga sudah mulai meningkat, kegiatan sosial keagamaan juga sudah mulai marak tetap dengan protocol yang ketat.

Namun Panda mengingatkan akan munculnya varian baru yang bisa saja terjadi seperti varian A, E dan Z seperti yang sudah diindikasikan oleh para ilmuwan. Karena itu pemerintah dianjurkan untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan pada liburan Natal dan Tahun Baru serta kegiatan tracking dan tracing untuk terus diterapkan. Karantina selepas bepergian perlu terus diterapkan

LAPORAN UTAMA

dengan mengurangi waktunya misalnya hanya 3-5 hari sudah cukup.

Beberapa ikhtiar yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik. Pertama upaya vaksinasi secara masif perlu dilakukan agar bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Namun diakuinya Indonesia belum punya stok vaksin yang cukup untuk bisa disuntikkan pada kurang lebih 2 juta target per hari. Kalaupun itu tercapai misalnya, namun ada juga tantangan lain karena masih banyak orang yang tidak mau divaksin karena berbagai alasan mulai dari keyakinan yang dianuti sampai alasan medis. Selain tentu kondisi geografis Indonesia dan juga sumber daya manusia yang jadi vaksinator jadi kendala tersendiri.

Kondisi masyarakat Asia, terutama di kota besar tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Di kota besar seperti Jakarta, menerapkan disiplin untuk jaga jarak di beberapa tempat seperti tempat kereta api, pelabuhan atau pasar adalah tantangan tersendiri.

TARGET YANG PAS

Dengan makin menurunnya kasus ineksi, Pandu berharap agar berbagai upaya yang selama ini dijalankan untuk terus dipertahankan. Misalnya

kewaspadaan harus menjadi kesadaran bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Untuk itu vaksinasi perlu terus dimasifkan, terutama mereka yang sangat rentan (vulnerable group) seperti orang tua, mereka-mereka yang punya penyakit bawaan (comorbid) terutama di daerah aglomelari seperti Jawa dan Bali. "Fokus pada daerah-daerah dengan penularan tertinggi seperti Jawa," kata Pandu. Selain itu testing dan tracing tetap harus dilaksanakan dengan dengan teknis yang matang terutama mereka yang berada di sekitar penderita maupun suspects.

Pandu berbicara agak netral soal vaksin. Menurut dia apapun vaksin yang dipakai di Indonesia jangan dipermasalahkan asal usulnya, karena sudah melampaui serangkaian kerja ilmiah yang tidak main-main. Karena itu misalnya jika ada tuduhan bahwa vaksin tertentu akan "expired" dalam tubuh setelah periode tertentu, Pandu justru mempertanyakan pendapat tersebut. Menurutnya setelah seseorang divaksin, maka kekebalan seseorang akan muncul, dan sel vaksin tersebut akan tetap punya memory yang baik dalam tubuh, sehingga ketika ada virus lain yang masuk ke dalam tubuh maka dengan sendiri antibody ini akan menyerang balik vaksin tersebut.





dr. Pandu Riono, Epidemiolog Universitas Indonesia

KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

Pandu yang sering diajak diskusi oleh pemerintah mengaku apa yang dilakukan pemerintah lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah tepat. Dari awal dia sudah berteriak agar, pembatasan kegiatan masyarakat harus secara nasional, karena kalau skalanya daerah maka agak sulit mengontrol pergerakan masyarakat antara daerah. Dengan berlaku secara nasional, pemerintah mengambil kendali “perang”.

Salah satu kunci pengendalian wabah ini menurut dia terletak pada leadership. Secara khusus dia mengapresiasi kepemimpinan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Banjaitan (LPB), yang mengkomandoi penerapan PPKM ini serta berbagai langkah kuratif yang diambil. Dengan kepemimpinan yang efektif, selain pemerintah pusat bertanggung jawab penuh, juga punya standar kebijakan yang baku yang diterapkan secara luas, plus sanksi-sanksi terukur yang perlu diambil.

Dengan kondisi yang ada sekarang Pandu optimis Indonesia bisa melewati badai covid dan bahkan berani memperkirakan, semester II /2022 sudah bisa kembali normal setidaknya, status endemic sudah benar-benar bisa diterapkan. “Kita bisa menang melawan wabah virus ini, karena kita sudah berada di jalur yang benar,” kata Pandu.

Pandu sendiri kurang sepakat dengan pendekatan di awal pandemi di mana asas keseimbangan ekonomi dan kesehatan menjadi pilihan kebijakan. Seharusnya, menurut dia yang paling utama adalah memastikan masyarakat yang sehat dulu baru urusan ekonomi. Jika sudah sehat maka dengan sendirinya ekonomi akan pulih. “Ini soal prioritas kebijakan, dan tidak boleh mengambil langkah yang mendua,” kata Pandu.

Untuk mendukung kebijakan besar ini maka pemerintah punya wewenang untuk memobilisir semua kekuatan bangsa yang berada di bawah kendalinya. Karena itu, tidak heran misalnya Badan Intelijen Negara (BIN), TNI/POLRI terlibat secara aktif melakukan vaksinasi massal dan pelaksanaan keiatannya lainnya.

PERTANYAKAN PCR

Pandu juga mempertanyakan kebijakan penggunaan test polymerase chain reaction (PCR) yang tujuannya tidak jelas apalagi sebagai syarat untuk perjalanan udara dan laut. Menurut Pandu, tidak ada bukti kuat yang melihat hubungan antara jumlah orang yang terbang misalnya dengan peningkatan infeksi. Dan yang lebih penting, test PCR itu bukan untuk menentukan orang dalam keadaan sakit atau tidak. Itu hanya sebagai sarana awal untuk menentukan kondisi seseorang.

Luhut dan Kepemimpinan Efektif di Masa Krisis



Luhut Binsar Panjaitan (LPB) adalah salah satu figur yang sangat dipercayai oleh Presiden Joko Widodo, sejak 2014. Dia telah berganti beberapa posisi strategis di pemerintahan, mulai dari kepala staf presiden, menteri koordinator politik dan keamanan, hingga kini menjabat sebagai menteri koordinator maritim.

Kendati dicurigai punya agenda pribadi, dan sangat ambisius menjadi presiden 2024, LPB tetap seperti biasa; setia tegak lurus dan loyal pada atasan, blak-blakan alias apa adanya, dan

sangat menguasai lapangan. Senioritasnya dalam pemerintahan, membuat LPB bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tegas, berani dan detail membuat beberapa kebijakan pemerintah Joko Widodo bisa berhasil dengan baik.

Menjadi komandan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sejak Agustus 2021 Luhut membuat banyak terobosan penting. Evaluasi dan perubahan kebijakan dilakukan setiap minggu (weekly basis). Banyak pihak mengeritik karena sepeertinya pemerintah

berubah-ubah mengeluarkan kebijakan. Tak kalah dunia usaha juga menggerutu karena mereka tidak bisa berjualan. Dia berani mempertaruhkan reputasi dan profesionalismenya dalam menjalankan kebijakan ini. “Jika ada kesalahan terjadi, itu tanggung jawab saya,” kata Luhut dengan tegas.

Luhut merespons kritik tersebut dengan bijak sambil mengakui bahwa, tidak ada negara yang berpengalaman dalam atasi pandemi serta tidak mungkin negara mencelakakan rakyatnya. Atas segala kekurangan pemerintah, LPB tak segan-segan meminta maaf pada rakyat Indonesia jika masih banyak yang kurang dalam pengendalian covid-19.

Alkisah, ketika LPB, begitu optimis bahwa setelah penyebaran Covid-19 varian Delta yang cepat bahkan kasus positif harian mencapai 20 an ribu, dengan percaya diri Luhut mengatakan bahwa dalam waktu dua minggu, tingkat infeksi menurun. Apa lacur, yang terjadi, bukannya menurun malah melonjak hingga mendekati 60 ribu kasus per hari. Dengan tenang dan terbuka Luhut menjawab kritik tersebut dengan dewasa sambil meminta maaf secara terbuka ke publik. Menanggapi sikap ksatria ini LPB punya alasan. “Ada tanggung jawab moral dari saya, kok belum bisa dihentikan (lonjakan kasus Covid-19) ini. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya, tapi tetap saja ada kegalauan itu,” kata Luhut dalam sebuah dialog live di stasiun TV swasta.

Sikap terbuka dan senioritas LBP di pemerintahan menjadi salah satu pendukung yang membuat dia diterima oleh berbagai kalangan. Di lingkaran politik dia adalah salah satu politisi senior di Golkar. Punya jaringan relasi di elit politik, bisnis organisasi sosial keagamaan dan organisasi sosial lainnya. Sebagai penganut Kristiani, LPB punya hubungan baik dengan ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.

Selalu optimistis adalah karakter LPB yang diakui banyak orang. Ditambah dengan karakternya yang terbuka, open minded, tegas dan berani LPB memang figur yang cocok untuk memimpin Indonesia dalam situasi darurat seperti Covid-19 ini. Beberapa kepala daerah merasakan sikap lugasnya. Seorang bupati di daerah Nusa Tenggara Timur menceritakan karakter leadershipnya ketika memimpin rapat. “Dia pingin segala sesuatu cepat, tuntas dan tidak ada yang disembunyikan, bahkan tak segan-segan memarahi kepala daerah atau anggota satgas yang lamban dalam bertindak,” kata Bupati Manggarai Hery Nabit. Beberapa pekerja media juga merasakan karakter Luhut dalam berbagai kesempatan.

Beberapa pekerja media juga mengakui

efektifitas Luhut dalam mengelola krisis. Berbekal pengetahuan teknis sebagai militer dengan segudang pengalaman dan pengetahuan, Luhut paham menggerakkan logistic, peralatan serta personal dalam memenangkan sebuah peperangan. Untuk mendapatkan banyak informasi di lapangan, Luhut tidak hanya mengandalkan informasi dan berita dari lembaga yang ada termasuk dari instansi pemerintah sekalipun. LPB membentuk sendiri satuan kerja sendiri, seperti informan untuk memastikan pelaksanaan protocol kesehatan di lapangan diterapkan dengan baik, benar dan tepat.

Secara lebih khusus LPB memelototi daerah, kota atau kawasan ekonomi seperti Jawa dan Bali. Di Bali misalnya Luhut secara intensif mengecek langsung ke lapangan apa yang sesungguhnya terjadi dan segera mengambil tindakan tegas apabila ada pelanggaran. Tak sedikit misalnya tempat hiburan harus ditiup sementara, seperti HolyWings di Jakarta beberapa waktu lalu demi memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak main-main dengan aturan dan pembatasan pergerakan orang.

Luhut merespons dengan baik ketika ada kritik tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil



LAPORAN UTAMA

kebijakan terkait PPKM. Luhut meyakinkan publik bahwa pemerintah tetap konsisten terhadap sikapnya yakni mengendalikan penularan wabah Covid-19. Ketika orang mulai euphoria atas pencapaian Indonesia menekan laju infeksi, terbukti dengan rendahnya angka penularan dan kematian, Luhut justru membangun opini di awal November, bahwa ada trend kenaikan angka infeksi di puluhan kabupaten terutama di Jawa dan Bali. Karena itu dia akan segera mengumpulkan kepala daerah di wilayah tersebut untuk segera mengambil tindakan berarti demi mengendalikan penularan terutama menjelang liburan akhir tahun (Natal dan Tahun Baru).

Kekhawatiran Luhut beralasan, karena walaupun Indonesia seperti diakui lembaga dunia sebagai negara yang berhasil, seperti yang disampaikan Center for Disease Control and Prevention akhir Oktober 2021 lalu, namun Luhut tidak mau kendor. Kekhawatirannya beralasan, karena pada saat bersamaan angka infeksi di beberapa negara Eropa seperti Rusia, Inggris, Prancis dan Spanyol masih sangat tinggi mencapai 50 ribu kasus per hari.

APRESIASI

Dari sering mengkritik kebijakan pemerintah, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono tak segan-segan mengangkat topi atas keberhasilan LPB sebagai panglima perang semesta dengan lawan utama virus yang ukurannya sekecil nano meter ini. Luhut sendiri tak menanggapi pujian tersebut. Dia malah sangat terbuka mengajak para peneritiknya untuk bergandeng tangan bersama pemerintah melakukan aksi nyata. Atau kalau beradu gagasan silahkan disampaikan secara ilmiah dan factual. "Dan yang penting harus dengan angka dan fakta. Kita selalu terbuka kepada siapa saja yang punya fakta yang lebih riil dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya berkali-kali.

Sebagai perwira tinggi militer, karirnya malah tidak secemerlang di pemerintahan. Bahkan Luhut tak sekalipun menjabat panglima di sebuah wilayah militer tertentu. Kendati pernah punya seabrek prestasi di pasukan elit TNI/AD Kopassus, dia tak pernah menjabat sebagai komandan jenderal. Hubungan baiknya dengan Presiden Abdurrahman Wahid, mengantarnya menjabat sebagai menteri perdagangan setelah sebelumnya menjadi duta besar Republik Indonesia di Singapore. Dilanjutkan dengan jabatan lain ketika presiden berganti.

Dalam sejarah militer tanah air, Luhut adalah salah satu tentara cemerlang dan punya loyalitas

tinggi pada pimpinan. Dia banyak belajar dari senior dan mantan pimpinannya Jenderal Almarhum LB Moerdani yang punya kepatuhan tegak lurus dan setia (loyal) pada atasan atau pimpinan waktu itu yakni Presiden Soeharto. Sikap sama juga ditunjukkannya pada Presiden Joko Widodo yang kebetulan sebelum menjadi presiden sudah dikenalnya dan bahkan pernah menjalin hubungan bisnis dengannya. "Tegak lurus dan patuh pada pimpinan," itu alasan LBP ketika ditanya salah satu kunci keberhasilannya dalam pemerintahan.

Kendati perang terhadap Covid-19 belum selesai, dan masih banyak yang harus dikerjakan terutama memantau vaksinasi di seluruh Indonesia kini LBP mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Tugas tim tersebut antara lain memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahapan perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD. Juga bertugas menyosialisasikan penggunaan produk dalam negeri serta memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

Sebelumnya pada tahun ini juga Luhut didapuk Jokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional. Dari namanya jelas tugas dia adalah menyelesaikan persoalan 15 danau yang mengalami pendangkalan serius antara lain Danau Toba dan Tondano. Sebelumnya selama pandemi 1,5 tahun belakangan Luhut pernah menjabat sebagai wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). LPB selalu menebarkan optimisme dan harapan pada bangsa ini.

Ketika penerapan syarat hasil test polymerase chain reaction (PCR) diwajibkan kepada pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, LPB kembali diguncang issue tidak sedap. Luhut di awal masa pandemi, tanpa berpikir panjang ketika rekan-rekan pebisnisnya, seperti Boy Thohir, Erick Waluyo mengajak mendirikan perusahaan importir peralatan pendukung PCR, melalui PT Genomic Solidaritas Indonesia.

Luhut tak membantah keterlibatannya. Secara hukum apa yang dilakukan Luhut dkk, adalah membantu pemerintah dalam suasana emergency dengan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk merespons situasi darurat. Luhut tak ragu mengundang pihak terkait untuk melakukan audit, dan menerima sanksi jika ditemukan penyimpangan dari sisi hukum.



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Makin Terbuka, Makin Percaya

Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menganugerahi pada Badan Publik (BP) dengan menggunakan Indikator Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pemerintah mencatat, bahwa tingkat partisipasi badan publik dalam keterbukaan informasi naik cukup signifikan setiap tahunnya, dari sebelumnya 62,83% pada tahun 2018, naik 74,37% pada tahun 2019 kemudian melonjak menjadi 93,1% tahun 2020.

Target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) agar setidaknya ada 35 badan publik yang masuk kategori informatif juga terlampaui karena dalam penghargaan tahun ini ada 60 lembaga publik yang memenangnya.

Komisioner KIP, Cecep Suryadi mengatakan kendati ada kemajuan dari tahun ke tahun dari sisi jumlah peserta maupun yang meraih penghargaan, namun secara umum masih banyak kendala dalam menghayati keterbukaan informasi pada lembaga publik. Yang paling utama misalnya, banyak lembaga publik khawatir justru semakin terbuka malah akan menjadi masalah baru (back fire) buat lembaga tersebut. “Mental keterbukaan ini belum dipahami secara utuh oleh badan publik (BP), padahal keterbukaan pasti akan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga pemerintah tersebut,” kata Cecep. Secara umum gambaran keterbukaan badan publik terlihat dari table berikut ini.

Ketua KIP, Gede Narayana mengatakan hampir 50% badan publik belum patuh pada ketentuan undang-undang. Menurut Gede, treatment terhadap lembaga publik yang ogah terbuka ini selain menghimbau, juga berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan assessment atas tingkat keterbukaan, memberikan bimbingan teknis kepada publik terkait, serta bimbingan teknis soal standar



PERISTIWA

dan indikator keterbukaan publik. Menteri Dalam Negeri misalnya akan memberikan teguran dan pembinaan kepada aparatnya agar membenahi manajemen keterbukaan informasi di daerahnya serta meningkatkan kapasitas personalnya.

BUAH DEMOKRASI

Wakil Presiden Republik Indonesia, M Maruf Amin, mengatakan selain karena ketentuan perundang-undangan, di era demokrasi dan serba transparan sekarang ini, lembaga pemerintah dan publik wajib membangun dan menjaga kepercayaan (trust) di mata publik (masyarakat). Untuk bisa dipercaya, katanya maka pemerintah terus menggelorkannya prinsip keterbukaan dan transparansi yang pada gilirannya akan mendapat dukungan luas dari masyarakat. “Untuk itu, semua badan publik juga harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis,” kata M Maruf Amin

KATEGORI	JUMLAH	%
Informatif	60	17,24
Menuju Informatif	34	9,7
Cukup Informatif	61	17,53
Kurang Informatif	47	13,51
Sumber : KIP (2021)		





Sebagai salah satu anggota pemrakarsa Open Government Partnership (OGP), kata wakil presiden, mau tak mau Indonesia harus terbuka, accountable, partisipatif dan innovative. Selain itu turut serta mendorong partisipasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab pada warganya.

Untuk Badan Publik Kategori Informatif, Wapres berharap agar mempertahankan kinerjanya dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan merespon dengan cerdas, cepat, tepat dan aman dalam penyediaan informasi publik di tengah derasnya arus informasi di era digital seperti saat ini.

Wapres juga berharap untuk badan publik yang telah menerima anugerah sebagai badan publik yang "Informatif" untuk mempertahankan kinerjanya. Sementara yang masih berada di kategori, "Cukup Informatif", "Kurang Informatif" bahkan "Tidak Informatif" untuk memperbaiki keterbukaan informasi publik, memperbaiki nilai-

nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasinya ke dalam setiap aspek pelayanan informasi tata kelola pemerintahan kepada publik.

Kendati sudah banyak BP yang puas atas pencapaiannya, namun tak sedikit yang kecewa dan mempertanyakan hasil yang diperoleh. Komisioner Informasi Publik, Roman Ndau Lendong merespon ketidakpuasan bisa disebabkan karena berbagai hal. Bisa jadi karena para pejabat di sana belum mengikuti sistematika kerja atau metoda penyampaian informasi kepada publik. Bukan berarti mereka sengaja menutup-nutupi informasi. Karena itu Roman optimis bahwa peringkat mereka bisa jadi akan membaik di masa mendatang.

Karena itu dia berharap para pejabat di kementerian Kesehatan untuk ikut serta dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dengan mengikuti beberapa pelatihan teknis yang diberikan oleh tenaga ahli dari Komisi Informasi Publik (KIP).

PERISTIWA



LAUNCHING IKIP

Menghitung Dampak Keterbukaan Publik

Komisi Informasi (KI) Pusat berhasil meluncurkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pertama kali secara nasional tahun 2021. IKIP adalah salah satu instrument untuk mengukur kualitas keterbukaan informasi lembaga publik pada rakyatnya. Peluncuran indeks ini adalah hasil kerja sama berbagai pihak. Dari internal KI sendiri sudah ada kelompok kerja (POKJA) IKIP bekerja sama dengan POKJA Propinsi, Tim Ahli Daerah dan Tim Ahli Nasional.

Sebelum menentukan skor rerata propinsi Indonesia, kajian atas studi IKIP dilaksanakan dalam sebuah forum tingkat nasional bernama National Assessment Council (NAC) Forum yang beranggotakan Informan Ahli (IA) serta pihak terkait. Kerja sama berbagai elemen ini berhasil menentukan skor rerata nasional dari 34 propinsi sebesar 71,37 (atau kategori sedang). Acara peluncuran IKIP tersebut belum lama ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 1 November oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama penanggung jawab IKIP KI Pusat Romanus N Lendong.

IKIP untuk pertama kali diluncurkan setelah UU No 14/2008 diundangkan pada tahun 2010 artinya setelah kurang lebih 11 tahun UU ini dilaksanakan. Sebelumnya penentuan peringkat keterbukaan informasi badan publik hanya ditentukan melalui proses monitoring dan evaluasi (monev). Karena itu Ketua KI Pusat Gede Narayana menyatakan kegembaraannya karena IKIP bisa ditetapkan untuk pertama kalinya dengan skala yang lebih luas.

Gede mengkonfirmasi bawah hasil skor akhir nilai IKIP nasional sebesar 71,37% adalah hasil rerata penilaian yang dilakukan oleh 312 Informan Ahli dari 34 propinsi yang memberi nilai indeks 72,60 dan Ahli Nasional hanya memberikan indeks 68,54. Hasil dari penilaian kedua kelompok ahli ini kemudian dijumlahkan serta dibagi secara nasional maka ditemukan hasil indeks rerata nasional tersebut.

Sementara itu Roman N Lendong mengatakan nilai indeks ini, akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai level keterbukaan informasi badan publik (BP). "Silahkan masyarakat sendiri menilai, namun tetap menilainya secara obyektif dan berimbang supaya jangan sampai



menimbulkan stigmatisasi atau persepsi yang buruk tentang sesuatu lembaga” kata Roman. Menurutnya masih banyak instrument lain yang bisa mengukur kinerja sebuah daerah dalam melaksanakan undang-undang. Setidaknya indeks ini menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kepatuhan sebuah lembaga dalam melaksanakan sebuah undang-undang.

Menurut Gede, antara Monev yang selama ini telah dijalankan untuk menjadi dasar penilaian IKIP akan terus diterapkan dan saling melengkapi. Monev digunakan untuk mengukur keputusan badan publik terhadap keterbukaan informasi dan menjadi data awal dalam proses penyusunan indeks selanjutnya. “Diharapkan program IKIP ini bisa menjadi program tahunan seperti kegiatan monev yang dilaksanakan secara rutin,”kata Gede.

Roman menambahkan secara prinsip IKIP telah mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, yakni mengukur kepatuhan badan publik (BP) terhadap UU KIP (obligation to tell), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan BP terhadap putusan sengketa Informasi Publik di KI untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). “Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya,” tegas Roman.

Roman menambahkan, memperoleh informasi dari badan publik adalah salah satu perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia. Ia menyampaikan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. “Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya,” tegasnya.



Bahkan menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. “Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan BP lainnya,

PERISTIWA



serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik,” katanya meyakinkan.

Demi mencapai level masyarakat yang informatif maka, pemerintah harus transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan badan publik harus bisa mengelola informasinya dengan baik.

Sementara itu Sekretaris KIP Pusat Munzaer menyampaikan bahwa kegiatan launching IKIP bertujuan, pertama untuk mensosialisasikan hasil temuan IKIP 2021. Kedua, tergambarkannya data secara kualitatif dan kuantitatif hasil temuan di lapangan, dan ketiga tereksposnya isu-isu temuan hasil pengolahan data IKIP demi perbaikan kualitas di masa mendatang.

DAMPAK LUAS

Menjadi pertanyaan besar, kira-kira apa dampak dari keterbukaan publik secara luas misalnya terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis di tanah air, proses penegakan hukum, dan yang penting kinerja aparat negara dan badan publik. Menjawab pertanyaan ini maka pada even launching tersebut terselenggara sebuah seminar menghadirkan beberapa pembicara penting seperti politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi I/DPR-RI, Dave F Laksono, Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Gaudiensius Suhardi serta inisiator dan Staf Ahli IKIP Yosef Adi Prasetyo.

Dave Laksono mengatakan keterbukaan informasi akan terasa dampaknya jika bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat, terbentuknya kepastian usaha untuk pebisnis, semakin terbukanya kompetisi ekonomi serta adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa dampak ikutan ini maka indeks keterbukaan informasinya tidak punya makna apa-apa.

Komisioner Informasi Daerah Yogyakarta Mohammad Hasyim menghargai launching indeks ini sebagai cara untuk melihat kulit informasi badan publik. Namun menurut dia, manfaat tersebut harus memberikan dampak yang lebih luas pada ekonomi, kesejahteraan dan demokrasi. Dalam bidang demokrasi misalnya bagaimana keterbukaan itu mendorong agar praktek demokrasi tidak semata soal teknis dan prosedur namun lebih substantif dan material dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Namun indeks ini adalah langkah awal, dan menjadi bahan perbaikan di masa depan demi membangun pemerintahan yang accountable dan transparent,” katanya Hasyim.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono menyambut baik IKIP sambil berharap agar badan publik selalu terbuka pada masyarakat



untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. “Momen ini sebagai salah satu milestone, karena nilai dari IKIP adalah rekam jejak yang penting buat bangsa. Semoga nilai ini menjadi motivasi bagi badan publik untuk terus bekerja dengan baik, menawarkan berbagai inovasi agar makin dipercaya masyarakat. Mari jadikan keterbukaan menjadi budaya,” kata Sultan yang sambutannya dibacakan oleh staff ahli sosial dan politik Provinsi DIY, dr Etty Kumolowati.

Sementara itu Ketua KI Pusat Gede Narayana menambahkan bahwa IKIP adalah sebuah produk kerja sama lintas stake holder sehingga hasilnya bisa dipastikan credible, terpercaya dan bisa menjadi acuan dengan data dan gambaran umum. Dari IKIP akan tersedia data dan gambaran yang komprehensif bagaimana badan publik mengelola informasinya. Yang kedua, IKIP akan menjadi semacam rekomendasi dan arah kebijakan yang diambil badan publik serta ketiga menjadi pedoman dalam memberikan asistensi kepada badan publik dalam meningkatkan keterbukaanya. Keempat akan menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan program baik soal keterbukaan maupun program pembangunan lainnya.

Sementara itu politisi senior dari Golkar Dave Laksono, menambahkan indeks ini tentu saja sebuah kemajuan bagi praktek good and open governance di Indonesia. Dulu beberapa operasi intelijen dianggap sebagai sesuatu yang tertutup namun kini sudah bisa dibuka secara proporsional.

Demikian misalnya beberapa informasi yang dianggap sensitive seperti di lembaga POLRI, Badan Inteligen Negara (BIN), harus membuka jika itu berkenaan dengan kebijakan, kecuali misalnya yang sangat privat seperti data pribadi seseorang.

Keterbukaan, menurut Dave akan berdampak positif misalnya pada minat investasi, karena Indonesia menunjukkan perbaikan system birokrasi, transparansi data, serta keterbukaan misalnya pada data tender. “Misalnya pengumuman tender sesuatu proyek tertentu mestinya harus diumumkan secara luas dengan jangka waktu yang lebih lama. Jangan seperti sekarang ini di beberapa lembaga, pengumuman tender hanya “berumur” 24 jam. Sehingga pemenang tender selalu dari kelompok tertentu yang sudah seperti praktek kartel,”kata putra politisi senior Agung Laksono.

Bagaimanapun, sambung Dave, keterbukaan informasi pada badan publik sangat penting. Karena bisa dipakai untuk mengukur kinerja lembaga, mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menjamin kepastian hukum (law certainty), serta lembaga publik bisa segera mengidentifikasi masalah dan mencegah system “percaloan” dalam kebijakan negara.

Pemimpin Redaksi Media Indonesia Gaudiens Suhardi menilai, kendati ada kemajuan dilihat dari indeks keterbukaan ini, namun ada beberapa kementerian yang banyak “bermasalah” jarang disorot. Misalnya Kementerian Agraria dan Tata

PERISTIWA



Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang masih menyimpan banyak masalah di bidang pertanahan, bahkan sampai melahirkan banyak mafia tanah justru tidak banyak mendapat perhatian.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Panut Mulyono dalam pemaparannya mengatakan praktek keterbukaan informasi di kampus yang dipimpinnya sudah menjadi bagian dari manajemen kampus yang moderan. Sebagai salah satu lembaga yang turut serta membangun karakter bangsa, maka universitas harus menjadi terdepan dalam menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan semua kebijakan di kampusnya. “Keterbukaan akan melahirkan suasana yang kondusif di kampus, seperti misalnya hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen, keterbukaan material pengajaran hingga proses seleksi masuk di kampus,” kata Panut.

Sejak tahun 2018 dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan lembaga pendidikan, UGM telah membentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sampai ke fakultas dan unit-unit kegiatan di kampus. “UGM selalu terbuka sejak perencanaan, rencana operasional, rencana strategis, rencana jangka panjang, rencana induk kampus, pembangunan infrastruktur kampus, sumber dana, proses tender dll,” kata Panut. Bahkan katanya termasuk pengelolaan asset kampus, pengelolaan keuangan, tri dharma, pengisian laporan harta dan kekayaan pejabat negara (LHKPN), besaran uang kuliah tunggal (UKT) juga laporan pencapaian. “Kita membiasakan untuk terbuka pada publik” katanya

Namun tantangannya menurut Panut adalah, kualitas perguruan tinggi bukan semata apa yang dilakukan secara internal, namun juga ada penilaian pihak luar termasuk cara perguruan tinggi



merealisasikan social development goals (SDGs) agenda, sehingga penilaian yang blended ini akan menciptakan perguruan tinggi yang berkelas.

Inisiator IKIP, Yosef Adi Prasetyo yang mempresentasikan hasil indeks keterbukaan daerah tingkat satu (propinsi) mengatakan bahwa indeks keterbukaan ini penting untuk menentukan praktek pemerintahan yang bersih, transparan dan dipercaya masyarakat.

Yosef mengatakan, secara umum memang ada beberapa kendala teknis dan situasional yang menyebabkan hasil IKIP secara nasional untuk kategori propinsi termasuk sedang. Ini disebabkan berbagai factor misalnya karena covid-19 yang membuat banyak refocusing anggaran membuat banyak PPID di daerah tidak berfungsi optimal. Di beberapa daerah bahkan pemerintah setempat tidak mengalokasikan anggaran untuk pejabat Komisi Informasi Daerah, atau bahkan belum ada kantor untuk mereka bekerja sehingga mereka tidak bisa menilai kondisi keterbukaan informasi di daerahnya.



Menangani ODGJ Secara Integratif

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat (KIP) memandang perlu menempuh pendekatan integrative dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena termasuk daerah dengan angka pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tertinggi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dr Celestinus Egya Munthe SpKJ MKes, setelah mengunjungi 4 kabupaten lain di NTT serta 4 provinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Gorontalo dan Riau menilai ada kemiripan problem dan tantangan di lapangan dalam penanganan ODGJ. Yaitu lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasaran terbatas, koordinasi lintas program yang masih tersendat serta kondisi geografis yang sangat menantang, seperti wilayah kepulauan NTT.

Menurut data kementerian kesehatan, terdapat kurang lebih 450,000 pasien ODGJ, dan belasan jutaan lagi yang masuk kategori orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMKJ) di seluruh Indonesia. Kini pendekatan dan tindakan yang dilakukan dengan promotive maupun preventif. Munthe melihat, keterlambatan bangsa menangani pasien ODGJ maupun dan terutama ODMKJ akan berdampak luas setidaknya mempengaruhi tingkat produktivitas nasional.

Dari sisi kesehatan, tindakan yang dilakukan sudah memadai walaupun banyak kendala di lapangan. Namun agar mendapatkan hasil optimal, perlu ada pendekatan lintas department, agar pasien ini bisa normal kembali, dan bisa bekerja setidaknya untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya.

NTT

Masalah ODGJ berkaitan dengan masalah sosial lain seperti tingkat kemiskinan masyarakat. Semua daerah bertekad menekan jumlah pasien ODGJ, dan membebaskan mereka dari pasung yang selama ini menjadi solusi jangka pendek dari keluarga agar pasien tidak mengganggu keluarga dan masyarakat.

Empat Kabupaten, yakni Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, atau dikenal dengan Manggarai Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertekad bebas pasung bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada akhir 2021. Hal ini disampaikan kepala daerah tiga kabupaten di sela-sela pelatihan bagi tenaga kesehatan (nakes) oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, belum lama ini.

Wakil Bupati Manggarai Barat, dr Yulianus Weng MKes menyambut baik pelatihan tersebut. Dia berjanji untuk membebaskan 50 pasien yang masih

KOMISIONER



dipasung di berbagai tempat di wilayahnya tahun ini juga. Selain tidak manusiawi, kata Munthe, pemasangan juga tidak menyelesaikan masalah, sehingga pelatihan tersebut menjadi bekal para nakes agar lebih terampil merawat pasien, misalnya memberi obat sesuai standar kesehatan. Selama ini para nakes, terutama pada layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan juga para dokter tidak berani memberikan obat-obatan kepada pasien karena khawatir menciptakan dampak medis serius.

Bupati Manggarai Hery Nabit mengaku senang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Keuskupan Ruteng yang selama ini merawat ODGJ di Panti Rehabilitasi Renceng Mose. Bagi Hery, salah satu prioritas pembangunan di wilayahnya adalah mengurus ODGJ, termasuk melepaskan mereka dari pasung.

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas terlibat langsung dalam upaya pelepasan pasung. Di Manggarai Timur terdapat 613 ODGJ, 40 di antaranya dipasung.

Dia berharap peserta pelatihan mendapatkan keterampilan memadai dan paling dibutuhkan untuk melayani ODGJ yang dianggap sebagai kaum terpinggirkan.

KESEHATAN JIWA

Munthe mengatakan pelatihan bagi dokter, mempunyai beberapa tujuan. Pertama, dari sisi manajemen peserta pelatihan mampu mengenal sarana dan prasarana kesehatan jiwa, sistem

kesehatan, ketersediaan anggaran, prioritas pengembangan kompetensi nakes, serta mampu melakukan asesmen atas kondisi pasien sebelum melepaskan pasung.

Kedua, nakes mampu mengenal keluarga pasien lebih dekat untuk pencegahan memburuknya kondisi pasien. Ketiga, pasien yang sudah dalam kondisi sehat diupayakan kualitas kesehatannya terus meningkat.

Untuk mewujudkan rencana tersebut puluhan tenaga kesehatan dari NTT telah mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan di salah satu rumah sakit jiwa tertua dan terbesar di Bogor, RS dr. H. Marzoeqi Mahdi (RSMH). Hasil pelatihan, sudah mulai terlihat di Manggarai Timur, karena makin tenaga kesehatan sudah sangat aktif menangani pasien dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mereka miliki.

Yang penting menurut Munthe setelah pasien sembuh. “Kita mengharapkan setelah sembuh, mereka bisa kembali ke keluarga dan masyarakat dan bernilai lagi setidaknya bagi diri dan keluarganya,” kata Munthe.

Di Provinsi NTT saat ini diperkirakan terdapat sekitar 7.770 ODGJ dengan berbagai tingkatan. Tiga kabupaten di Manggarai Raya memiliki setidaknya 1.500 pasien dan sekitar 130 di antaranya dipasung.

RUMAH SAKIT JIWA

Pemerintah daerah di Flores, selama ini sudah lama berkeinginan untuk memiliki rumah sakit jiwa. Selama ini di NTT hanya punya satu rumah sakit tapi letaknya di Kupang dengan kapasitas kurang lebih 220 tempat tidur. Secara geografis, NTT tampaknya perlu memiliki satu lagi rumah sakit khusus pasien jiwa. Namun tentu saja ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi termasuk luas lahan yang cukup serta tenaga kesehatan yang memadai.

Komisioner KI Pusat Roman N Lendong yang selama ini sangat aktif mendorong kerja sama lintas departemen dan pemerintah daerah, dalam penanganan ODGJ di NTT mengatakan sudah sepantasnya NTT mendapatkan jatah satu rumah sakit jiwa lagi. Namun Munthe berharap sebelum rencana tersebut terwujud, pemerintah daerah perlu mendorong rumah sakit daerah yang ada menambah kapasitas tempat tidurnya setidaknya 10 unit tempat tidur khusus untuk menanganai pasien ODGJ. Selain itu pada saat bersamaan pemerintah daerah harus ambil inisiatif mempersiapkan proses rehabilitasi, dan penambahan skill bagi pasien agar mereka bisa kembali bekerja dan produktif.



Hak Untuk Tahu

Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan badan publik lainnya untuk kehidupannya. Agar rakyat sadar akan salah satu hak dasarnya ini, maka setiap tahun pada tanggal 28 September diperingati Hari Hak Untuk Tahu atau *Right To Know Day* (RTKD) yang belum lama ini diselenggarakan oleh Komisi Informas Publik pada 28 September lalu.

Acara tersebut dikemas bersamaan dengan pemberian Anugerah Apresiasi Implementasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 Desa terbaik di saksikan oleh perangkat desa di 83.820 desa dari seluruh Indonesia secara *hybrid (on line dan off line)*.

Sebagaimana diketahui, deklarasi peringatan RTKD pertama kali digelar di Kota Sofia Bulgaria 19 tahun silam atas inisiatif organisasi pegiat keterbukaan Informasi Publik dunia bersama sejumlah negara demokrasi.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan bahwa peringatan RTKD se-dunia cara untuk mengingat kembali kepada badan publik, agar melaksanakan pelayanan keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Menurut Gede, RTKD diperingati lebih dari 60 negara demokrasi di dunia sebagai puncak dari gerakan Open Government dari negara-negara

anggota Open Government Partnership. Adapun pendiri badan ini, menurutnya adalah Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan AS dengan kesadaran bahwa setiap warga negara punya hak untuk mengakses informasi publik serta berkewajiban mengawal dan mengontrol hasil pembangunan.

Sementara Penanggungjawab RTKD KI Pusat Wafa Patria Umma menyampaikan ada sepuluh prinsip utama yang dikampanyekan dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia. Pertama, akses informasi adalah hak setiap orang, kedua informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian, ketiga hak untuk tahu diaplikasikan di semua BP, keempat semua permintaan informasi harus cepat, sederhana, tepat waktu dan biaya ringan, kelima para pejabat BP memiliki tugas untuk melayani pemohon informasi.

Adapun prinsip keenam, menurut Komisioner Bidang ASE KI Pusat ini, adalah penolakan harus berdasarkan Undang-Undang, ketujuh kepentingan publik menjadi hak yang lebih tinggi dari kerahasiaan, kedelapan setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi keputusan yang merugikan, kesembilan BP harus proaktif menginformasikan tentang lembaganya, dan kesepuluh hak atas informasi dijamin oleh Undang-Undang (Karel).



Meningkatkan Kapasitas Panitera dan Panitera Pengganti

Para panitera (P) dan panitera pengganti (PP) adalah salah satu bagian penting dalam penegakan hukum keterbukaan informasi di Badan Publik. Karena itu Panitera Pusat, perlu membekali mereka dengan kemampuan teknis serta keahlian lain agar mereka bisa bekerja dengan baik menegakkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Untuk itu Komisi Informasi (KI) Pusat RI melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tentang penyusunan putusan adjudikasi non-litigasi melibatkan empat ahli hukum dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI selaku Narasumber. Bimtek dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Komisioner Bidang PSI Arif Adi Kuswardono serta sekretaris KI Pusat Munzaer belum lama ini di Bogor. Acara itu diselingi dengan pengambilan sumpah oleh komisioner Pusat

Menurut Gede, sejak KI Pusat berdiri tahun 2009, baru sekarang ini dilaksanakan sumpah terhadap Panitera dan PP sehingga KI Daerah juga perlu segera melaksanakan sumpah terhadap Panitera dan PP agar keberadaan Panitera dan PP dalam persidangan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Sumpah dan pakta integritas bagi Panitera dan PP, menurutnya dapat meningkatkan kualitas putusan dari persidangan sengketa informasi di KI seluruh Indonesia.

Gede menambahkan, demi meningkatkan

kualitas putusan, panitera perlu tahu cara penyusunan putusan yang baik dari persidangan sengketa informasi di KI Pusat dan KI Daerah. Untuk itu, menurutnya peran para ahli hukum dari pusdiklat MA yang terdiri dari Pahala Simanjuntak, SH MH, Dr Asra SH MH, Achmad Dimiyati SH MH, dan Bambang Heryanto SH MH sebagai Narasumber dalam Bimtek Penyusunan Putusan sangat besar dalam meningkatkan kemampuan MK.

Selain memberikan materi tentang penyusunan putusan, pembuatan berita acara persidangan, Narasumber juga menggelar simulasi persidangan agar efektif dalam membuat putusan sengketa informasi. Para peserta Bimtek dari KI Pusat dan KI Daerah tampak bersemangat mengikuti seluruh rangkaian bimtek hingga selesai karena peserta merasakan adanya tambahan ilmu dalam upaya sidang penyelesaian sengketa informasi publik.

Sementara komisioner KI Pusat, Arif A Kuswardono menyampaikan bahwa sangat diperlukan adanya anatomi putusan yang baik dalam setiap persidangan sengketa informasi sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dari seluruh Majelis Komisioner baik di KI Pusat maupun di KI Daerah. Ia juga mengatakan bahwa adanya pengambilan sumpah terhadap Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan KI Pusat menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas putusan sidang sengketa informasi. *(Laporan/Foto: Karel Salim)*

KOMISIONER



Sinergi KIP dan KOMPOLNAS

Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS) menandatangani nota kesepahaman untuk lebih sinergis dalam membangun kerja sama untuk mendorong keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Kesepakatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Dari KI Pusat hadir Ketua KI, Gede Narayana bersama Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat Muhammad Syahyan. Dari Kopolnas yang diwakili Sekretaris Kopolnas Benny Mamoto serta Komisioner Kopolnas Muhammad Dawam.

Pada saat yang sama Kopolnas juga melakukan penandatanganan kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PP Polri. Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan harapannya yang besar agar sebagai badan publik (BP) Kopolnas harus lebih terbuka dan accountable dalam menjalankan tugasnya.

Ia juga menyatakan kegembiraannya, karena adanya kerjasama KI Pusat dengan Kopolnas menunjukkan komitmen bersama kedua lembaga yang sangat kuat untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, sebelum Prof Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Kopolnas RI dan

Menkopolhukam RI sudah didaulat sebagai Duta Keterbukaan Informasi oleh KI Pusat.

Gede Narayana juga menjelaskan bahwa MoU KI Pusat dan Kopolnas meliputi kerjasama, Tenaga Ahli di bidang masing-masing dan sejumlah pelatihan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu juga kerjasama dalam diseminasi dan publikasi. Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan.

Benny menyampaikan bahwa antara Kopolnas dan KI Pusat punya maksud yang sama dalam pengawasan fungsional kinerja Polri dan Pelayanan Publik dalam bidang keterbukaan informasi publik.

“Kita ketahui bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi kita dalam pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, dimana tuntutan masyarakat saat ini untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah di akses, sejalan dengan era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Oleh sebab itu dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka menjadi keharusan seluruh badan publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik dalam menyediakan informasi publik. (Laporan: Karel Salim/Foto: Eni Fajar)

BNI 46 Smart City: Bantu Pemda Tingkatan Pendapatan

Bank pemerintah papan atas, BNI 46, dengan asset sebesar Rp 896 triliun pada tahun 2020, mendorong daerah menggunakan teknologi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya. Ikhtiar ini sebagai bentuk tanggung jawab BNI dalam mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan membangun eco-system, BNI ingin agar semua stake holder di sebuah daerah bisa dihubungkan dengan beragam layanan yang ditawarkan bank BNI demi misalnya membantu meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi daerah dengan cara yang transparan, real time dan accountable melalui program smart city.

Hermita, senior vice president optimalisasi bisnis BNI 46 – mengatakan dengan membangun eco system yang ada di sebuah daerah maka memudahkan pimpinan daerah misalnya mengontrol semua pemasukan, memastikan data-data aktivitas ekonomi, jumlah pedagang yang aktif secara real time hingga memastikan sampah yang selama ini dianggap jadi masalah bisa menjadi berkah bagi sebuah daerah.

Hermita menambahkan, bahwa program smart city ini demi mendukung kebijakan pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD) dengan sasaran antara lain mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi transaksi dan tata kelola serta mengintegrasikan system pengelolaan keuangan daerah

Daerah kini bekerja keras meningkatkan pendapatan lewat retribusi atau pajak daerah lainnya. Namun sebagaimana kita mahfum, antara cita-cita dan realisasi sering jomplang. Karena tidak transparan dan tidak dilakukan secara digital misalnya daerah tidak mendapatkan hasil yang optimal.

Karena itu Hermita berkeyakinan dengan menerapkan smart city di daerah dengan memberdayakan semua ecosystem yang ada di daerah maka daerah bisa mendapatkan manfaatnya. Misalya ekosistem UMKM, pedagang pasar, layanan sektor kesehatan hingga sektor pariwisata.



BNI punya layanan smart government/ city antara lain meliputi; Solusi Pembayaran/ Belanja Daerah (Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI Market Place yang membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM dan memasarkan secara online, Penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash dan LinkAja) bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society.

“Kita menggunakan berbagai channel yang

kita miliki seperti mobile banking, credit card, pembayaran, merchant atau QRIS, pinjaman atau lewat program agen Bank BNI,” kata Hermita.

BNI juga mendorong misalnya UMKM di daerah agar mereka naik kelas dalam hal pengelolaan keuangan, manajemen, hingga mereka mencintai kebersihan dengan melatih mereka agar menjual sampah di bank sampah dan mereka mendapatkan tambahan pendapatan. Bagi pemerintah daerah, sumber pendapatan mereka bisa menjadi beragam, karena dikelola secara transparan dan real time.

Selama ini daerah sudah melakukan pungutan pajak dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan lokal, apakah itu bank daerah atau koperasi setempat. Kehadiran BNI terkadang ditolak pemda setempat, namun setelah dijelaskan bakal ada kolaborasi dengan misalnya sharing fee, akhirnya mereka bisa diterima dan ternyata berhasil.”Kita tidak mau caplok bisnis yang mereka telah jalankan, kita menawarkan kolaborasi dengan mereka dengan membagi hasil, kita bisa beri layanan dengan multi channel service yang BNI miliki,”kata Hermita.

Setidaknya kurang lebih 20 daerah/kota yang telah menjalin kerja sama dengan BNI dengan berbagai macam layanan. Di kota Solo, misalnya selain bekerja sama dengan pemda, juga membina pedagang pasar. Ada kurang lebih 3,000 pedagang di pasar Klewer yang sedang dibangun kerja sama dengan BNI dan setidaknya 50% dari pedagang ini sudah punya rekening bank BNI 46. Pedagangnya sendiri, dibina kapasitasnya, hingga difasilitasi kreditnya sehingga mereka bisa menjadi ekspostir karena kualitas usahanya makin besar dan bagus.

Dalam program ini termasuk juga mengubah mindset para pelaku usaha, aparat serta stake holder lainnya di daerah. Misalnya kita mendorong pembentukan ecosystem rumah sakit, bank sampah. Selain itu mereka membantu pemerintah membuat mapping atas potensi daerahnya masing-masing. Setelah terbentuk maka akan mudah bagi pemda atau BNI mengembangkan ecosystem yang sesuai dengan daerahnya.

Berbeda dengan program sebelumnya, program kota dan daerah cerdas ini lebih komplis karena bisa memberikan banyak solusi bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Lombok Barat, NTB misalnya tadinya meragukan kehadiran mereka berkenaan dengan smart city karena selain menambah beban juga dianggap ribet.

Pemda tersebut sudah merasakan manfaatnya karena retribusi pemda sudah meningkat cukup signifikan. Demikian juga BNI sendiri, karena mereka bisa memberikan banyak service seperti

“Kita menggunakan berbagai channel yang kita miliki seperti mobile banking, credit card, pembayaran, merchant atau QRIS, pinjaman atau lewat program agen Bank BNI.”

pinjaman, kredit UMKM, kredit usaha rakyat atau fee transaksi.

Pemda Lombok Barat bisa melihat secara transparan dan real time semua pendapatan mereka dari retribusi pasar. “Akhirnya semua pasar sekarang sudah memakai layanan kami, “kata Hermita bangga.

Selain itu banyak peluang kerja juga bisa tercipta misalnya menjadi agen bank BNI. Para pedagang juga mendapatkan fasilitas kredit, memberikan pinjaman serta fasilitas perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Urusan pengelolaan smart city ini, dikelola oleh Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKD) atau Bapeda yang punya dash board untuk mengontrol pemasukan dari retribusi misalnya. “Dengan system yang transparan dan real time ini, kita cegah sedapat mungkin praktek korupsi atau uang di bawah meja,”kata Hermita.

Demikin juga ecosystem kesehatan daerah bisa juga menggunakan program smart city. Dengan itu misalnya bupati/wali kota bisa mengetahui penyakit per daerah, atau daerah yang tidak terjangkau satu penyakit tertentu. Data ini bisa menjadi dukungan dalam pengambilan kebijakan lanjutan di sektor tersebut. “

Tadinya ketika BNI datang ke daerah, sejumlah pertanyaan dan bahkan ada penolakan dari beberapa pihak karena banyak pemimpin daerah kurang suka kalau urusan “pungut “uang semakin transparan. Buat beberapa pemimpin daerah, lebih tertutup malah “lebih baik” buat mereka dan kelompoknya untuk menilep uang dari berbagai sumber, misalnya pungutan retribusi pasar, uang kebersihan yang dibayar dengan cash tunai. Hermita meyakini bahwa banyak upaya digitalisasi penerimaan pendapatan sudah menjadi kebutuhan daerah.

BUKA

Majalah Komisi Informasi Pusat (KIP)